

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN UMKM
PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS DI DESA TANGGULREJO KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**Oleh :
Husnayatul Munawaroh
I01218010**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2022**

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Husnayatul Munawaroh

NIM : I0121010

Prgram Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 21 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Husnayatul Munawaroh

NIM: I01218010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Husnayatul Munawaroh

NIM : I0121010

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S.Sos dalam bidang ilmu politik.

Surabaya, 21 Desember 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP 196909071994032001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Husnayatul Munawaroh dengan judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Tangulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 16 Januari 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP : 196909071994032001

Penguji II

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP : 197803152003121004

Penguji III

Holilah, S.Ag, M.Si
NIP : 197610182008012008

Penguji IV

Noor Rahman, M.A.
NIP : 198510192015031001

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Sunan Ampel Surabaya

Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP: 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Husnayatul Munawaroh
NIM : I0121010
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
E-mail address : husnayatulmnw@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN UMKM PADA MASA
PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI DESA TANGGULREJO KECAMATAN
MANYAR KABUPATEN GRESIK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 April 2023

Penulis

(Husnayatul Munawaroh)

ABSTRAK

Husnayatul Munawaroh, 2022. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Pemerintah Desa, UMKM, Covid-19*

Peran pemerintah Desa Tanggulrejo dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 pada pengembangan UMKM berjalan dengan cukup baik, pemerintah desa sudah memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM namun, adanya perubahan lingkungan, ketersediaan sumber daya dan perubahan permintaan menuntut usaha kecil, menengah dan mikro di Desa Tanggulrejo untuk terus menyesuaikan diri, sehingga masih membutuhkan dukungan pemerintah daerah. UMKM mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo juga turut merasakan dampak dari pandemi covid-19. Pemerintah mempunyai peranan penting untuk bisa membantu pelaku UMKM yang mengalami keterpurukan akibat pandemi covid-19. Maka dari itu, penelitian ini mengkaji permasalahan yaitu (1) Bagaimana peran Pemerintah Desa Tanggulrejo dalam mengembangkan UMKM di masa pandemi covid-19.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah Desa Tanggulrejo dalam mengembangkan UMKM di masa pandemi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori governance.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tanggulrejo mempunyai peran penting dalam mengembangkan UMKM, dalam hal ini pemerintah Desa Tanggulrejo telah memberikan program pelatihan kepada pelaku UMKM seperti pelatihan pemasaran, foto produk, pengelolaan keuangan dll. Selain itu, pemerintah Desa Tanggulrejo memberikan fasilitas yang berupa website desa diperuntukkan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya yang terhubung langsung dengan kontak dari pelaku UMKM. Dalam melakukan perannya pemerintah desa juga tidak lepas dari pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. pemerintah desa sudah memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya akan tetapi, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum mencapai hasil maksimal dikarenakan kurangnya antusias dari pelaku UMKM untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut sehingga mereka masih belum bisa mengembangkan usahanya dengan baik.

ABSTRAK

Husnayatul Munawaroh, 2022. *The Role of the Village Government in the Development of MSMEs during the Covid-19 Pandemic (Case Study in Tanggulrejo Village, Manyar District, Gresik Regency), Scripting Program for Political Science, Faculty of Social Sciences and Political Science, UIN Sunan Ampel Surabaya.*

Keywords: Village Government, MSMEs, Covid-19

The role of the Tanggulrejo village government in overcoming the impact of the Covid-19 pandemic on the development of MSMEs is quite good, the village government has provided training to MSMEs actors, however, there are environmental changes, resource availability and demand changes demanding small businesses, The middle and micro villages in Tanggulrejo Village continue to adjust, so they still need local government support. MSMEs have an important role in economic growth in Indonesia, MSMEs in Tanggulrejo Village also feel the impact of the COVID-19 pandemic. The government has an important role to be able to help MSME perpetrators who suffered from the Covid-19 pandemic. Therefore, this study examines the problem, namely (1) How the Tanggulrejo Village Government played in developing MSMEs during the COVID-19 pandemic.

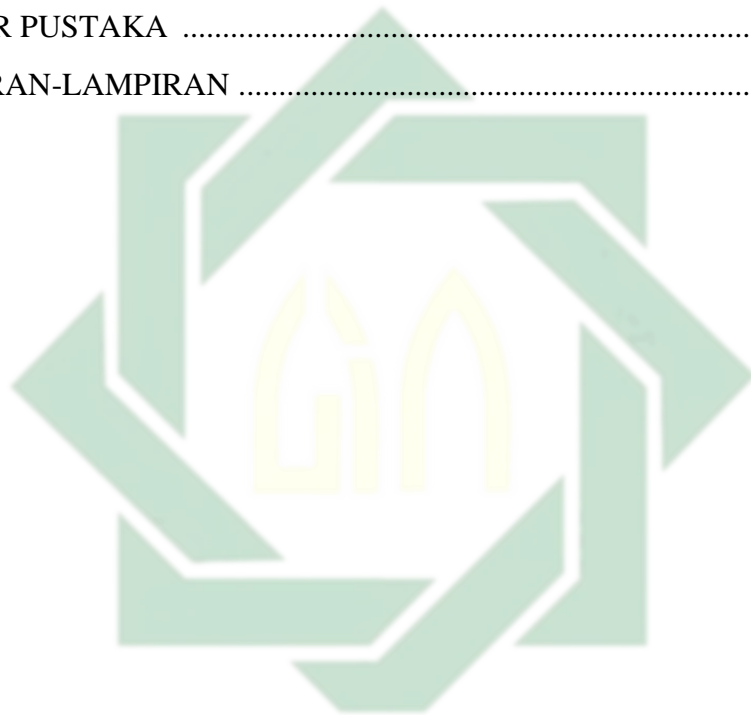
The purpose of this study is to find out the role of the Tanggulrejo Village government in developing MSMEs during the pandemic. This study used descriptive qualitative methods using data collection techniques through observation, interview, and documentation processes. The theory used in this study uses governance theory.

The results of this study show that the Tanggulrejo Village government has an important role in developing MSMEs, in which case the Tanggulrejo Village government has provided training programs to MSMEs such as marketing training, product photos, financial management etc. In addition, The Tanggulrejo Village government provides facilities in the form of a village website intended for MSMEs to market their products directly connected to the contact of MSMEs. In doing its role, the village government is also not independent from the local government as it stands for the central government. The village government has made room for MSMEs to develop their businesses, however, the implementation of these activities still has not achieved the maximum results due to the lack of enthusiasm from MSMEs to participate in the training activities so that they still cannot develop their business properly.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Konseptual.....	13
BAB II : KAJIAN TEORITIK	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	19
1. Studi Tentang Peran Pemerintah	19
2. Pandemi Covid-19 dan Peran Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19.....	22
3. Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid-19	31
4. Pemerintahan Desa	34
BAB III : METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Pemilihan Subjek Penelitian	43
D. Tahap-Tahap Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	50
G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	52
H. Sistematika Pembahasan	53

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	55
A. Gambaran Umum Desa Tanggulrejo	55
B. Peran Pemerintah Desa Tanggulrejo Dalam Mengembangkan UMKM di Masa Pandemi Covid-19	64
BAB V : PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Usaha Mikro Kecil Desa Tanggulrejo	5
Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga di Desa Tanggulrejo	56
Tabel 3. Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Penduduk Desa Tanggulrejo ...	57
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanggulrejo	58
Tabel 5 Fasilitas Pendidikan Desa Tanggulrejo.....	59
Tabel 6. Klasifikasi Pekerjaan Masyarakat Desa Tanggulrejo	60
Tabel 7. Anggota UMKM Desa Tanggulrejo	61



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru yang bernama corona virus atau biasa dikenal dengan covid-19 yang menyebabkan dampak luar biasa terhadap aspek kehidupan dan lainnya. Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, China yang kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, dalam hal ini WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menetapkan bahwa virus covid-19 sebagai pandemi global. Terdeteksinya covid-19 di Indonesia terjadi pada awal bulan Maret 2020 hingga saat ini, tidak hanya memberikan dampak terhadap aspek kesehatan saja namun juga pandemi covid-19 ini memberikan dampak yang buruk di sektor kehidupan masyarakat. Hampir semua sektor yang ada di Indonesia mengalami dampak dari pandemi ini terutama dalam bidang ekonomi, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani pandemi covid-19 mengakibatkan 3 dampak besar pada sektor perekonomian Indonesia yaitu: Pertama, hal ini berdampak tingkat daya beli masyarakat pada konsumsi rumah tangga mengalami penurunan yang signifikan. Kedua, melemahnya investasi di masa pandemi covid-19. Ketiga, pandemi covid-19 memberikan dampak pada pelemahan ekonomi

di seluruh dunia hal ini juga berdampak pada ekspor Indonesia yang terhenti.¹

Wabah covid-19 ini menyebar keseluruh dunia hingga menyebabkan terhambatnya kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Berbagai sektor ekonomi, politik, kesehatan, sosial turut merasakan dampak dari pandemi covid-19. Meningkatnya kasus covid-19 begitu cepat hingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran covid-19 di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan konferensi pers yang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang telah dipilihnya untuk menghadapi COVID-19 yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dalam konferensi pers, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pilihan untuk menghadapi kedaruratan kesehatan.

Dengan adanya pembatasan mobilitas masyarakat tersebut menyebabkan terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, banyaknya tempat pariwisata yang ditutup, pendidikan yang dialihkan secara daring serta kegiatan masyarakat terhambat memberikan pengaruh buruk terhadap perekonomian domestik maupun keberadaan pelaku UMKM. Berbagai faktor yang mempengaruhi naik turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya adalah

¹ Situmorang, P. Anggun , Sri Mulyani: *Corona Beri 3 Dampak Besar Ekonomi Indonesia*, Diakses pada 29 Oktober 2021 <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4292763/srimulyani-corona-beri-3-dampak-besar-ke-ekonomiindonesia>

partisipasi usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan mandiri memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Usaha kecil, menengah dan mikro mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. UMKM di Indonesia mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, menurut data Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah (KOMENKOP UKM), jumlah usaha mikro di Indonesia sebanyak 62.106.900, usaha kecil sebanyak 757.090, usaha menengah 58.627, dan usaha besar sebanyak 5.460. Selama ini UMKM dinilai mampu menopang 80% konsumsi domestik, menyumbang 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan mampu menyerap 97% tenaga kerja dan menyediakan 90% kesempatan kerja di Indonesia.² Namun pandemi ini memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha mikro kecil maupun menengah, pasalnya pelaku UMKM tidak bisa berjualan seperti biasanya dikarenakan sepi pembeli akibat dari mobilitas pembatasan masyarakat.

Berbagai faktor yang mempengaruhi naik turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya adalah partisipasi usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan mandiri memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Usaha kecil,

² Siti Aisyah, *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Serta Strategi E-Marketing UMKM di Indonesia* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), Hal. 2.

menengah dan mikro mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara.³ Adanya kebijakan mengenai sosial distancing dan beberapa wilayah yang melakukan lockdown memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pasalnya, dampak dari kebijakan tersebut banyak dari pelaku UMKM yang tidak bisa berjualan dengan bebas seperti dulu serta sepi pembeli yang berdampak pada menurunnya omset penjualan. Dampak covid-19 ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM yang berada di perkotaan saja, namun juga pelaku UMKM yang berada di desa juga turut merasakannya salah satunya adalah pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo.

Desa Tanggulrejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan memiliki jumlah UMKM sebanyak 20 UMKM yang tersebar di setiap dusun, sebelum terbentuknya UMKM di Desa Tanggulrejo dahulunya merupakan sebuah komunitas ibu-ibu penjual makanan dan minuman di setiap acara yang diadakan oleh pemerintah desa maupun karang taruna Desa Tanggulrejo melihat perkembangannya semakin baik serta antusias masyarakat yang baik dalam membantu roda perekonomian ditingkat desa, maka dari itu pemerintah Desa Tanggulrejo mengesahkannya menjadi UMKM. Para pelaku UMKM di desa ini menjual beberapa macam kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya

³ Kementerian Investasi, *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia> diakses pada 30 Agustus 2022, pukul 13.30 WIB.

relatif sangat kecil. Mereka juga turut merasakan sepi pembeli dan juga merasakan kerugian akibat dampak dari covid-19. Sebagian besar wilayah Tanggulrejo ini adalah area tambak yang hasil alamnya berupa ikan bandeng, nila dan udang vaname. Beberapa pelaku UMKM di desa ini memanfaatkan hasil alam tersebut menjadi berbagai macam makanan seperti otak-otak bandeng, kerupuk, pentol, cireng, siomay bandeng dan beberapa olahan makanan lainnya. Adapun di bawah ini merupakan tabel pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo.

Tabel 1 Data Usaha Mikro Kecil Desa Tanggulrejo

No.	Nama	Toko	Jenis	Produk
1.	Titin	Mahardika	Makanan	Arumanis & Madumongso
2.	Ahmad Moh Nadlif	Bandeng Bu Afifah Indonesia	Makanan	Olahan Bandeng, Ikan Segar Laut dan Tambak & Udang
3.	Yasmin	Yasmin Cake	Makanan	Cake
4.	Nikmah	Berkah Kylaish	Makanan & Minyak Wangi	Tepung serba guna & minyak wangi
5.	Famirah	Famirah	Makanan	Roti Kacang
6.	Faiq	Martabak Senja Rasa	Makanan	Martabak & Terang Bulan
7.	Nahdliyatul	Nikiprinting	Kerajinan	Souvenir & Undangan Digital
8.	Istilah	MJ Crispy	Makanan	Baby Mujair Crispy
9.	Rosyidah	Kerupuk Diva	Makanan	Kerupuk
10.	Maimun	Pentol Amo	Makanan	Pentol
11.	Toyyibah	Putri	Makanan	Cake dan Nasi

12.	Umu Kholidah	Mie Geprek Ndeso	Makanan	Mie Geprek dan Jajanan Pasar
13.	Khalimah	Otak-Otak Bandeng	Makanan	Otak-Otak Bandeng

Sumber : Arsip data UMKM Desa Tanggulrejo 2021

Semenjak diberlakukannya PSBB pada awal pandemi, pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo mengalami penurunan hingga 50%, seperti yang dijelaskan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (covid-19) meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Hal ini mengakibatkan terhambatnya kegiatan penjualan dan produksi dikarenakan tidak adanya kegiatan masyarakat seperti seperti hajatan, kegiatan sosial maupun keagamaan. Adanya PSBB pada awal pandemi membuat semua aspek kehidupan terhambat.

Sementara itu, pada tanggal 24 April 2020 Bupati Gresik Sambari Halim Rudianto telah mengeluarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gresik. Dari 18 kecamatan hanya delapan kecamatan yang diberlakukan PSBB, diantaranya yaitu Menganti, Driyorejo, Kebomas, Manyar, Benjeng, Dudusampeyan, Sidayu dan Gresik. Untuk Kecamatan Menganti, Driyorejo, dan Kebomas diberlakukan untuk semua desa. Kecamatan Manyar memberlakukan PSBB ini untuk semua desa kecuali Karangrejo dan Nambi, untuk Kecamatan Benjeng memberlakukan PSBB di dua desa

yaitu Pundutrate dan Metatu sedangkan Kecamatan Duduksampeyan memberlakukan PSBB ini di desa Ambeng-Ambeng dan Watangrejo. Adapun Kecamatan Sidayu yang menerapkan PSBB hanya di Desa Randuboto dan Purwodadi, untuk Kecamatan Gresik hanya menerapkan kebijakan ini di aera pelabuhan umum maupun pelabuhan bingar muat.⁴ Pada peraturan PSBB Kabupaten Gresik ini menerapkan aturan jam malam bagi UMKM dan PKL yang diperbolehkan buka mulai pagi hingga jam 21.00 dalam peraturan tersebut penjual diperbolehkan untuk melayani makan ditempat akan tetapi pengunjung tidak boleh duduk berdekatan. Pemberlakuan jam malam tersebut tidak hanya diberlakukan bagi kecamatan yang menerapkan PSBB namun juga diberlakukan bagi seluruh kabupaten Gresik.

Adanya peraturan tersebut turut juga dirasakan oleh pedagang pentol keliling yang ada di Desa Tanggulrejo, pasalnya mereka tidak bisa berjualan seperti dulu selain itu ada beberapa kendala lain yang mengakibatkan sepiunya pembeli yaitu, pertama dialihkannya pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh baik di lingkungan sekolah maupun di pendidikan Al-Qur'an, kedua adanya pengecekan poin di area perbatasan Desa Tanggulrejo dengan Kecamatan Glagah, ketiga adanya beberapa desa yang menerapkan lockdown sehingga pedagang dari luar desa tidak bisa masuk ke wilayah tersebut. Maka dari itu, pelaku UMKM yang ada di Desa

⁴ Dian Kurniawan, *PSBB di Gresik Diberlakukan di 8 Kecamatan*, <https://surabaya.liputan6.com/read/4233805/psbb-di-gresik-diberlakukan-di-8-kecamatan-cek-detailnya#:~:text=Liputan6.com%2C%20Surabaya%20Pembatasan%20Sosial,%2C%20Duduksampeyan%2C%20Sidayu%20dan%20Gresik>. Diakses pada 31 Agustus 2022, pukul 12.51 WIB.

Tanggulrejo sangat merasakan dampak dari pandemi covid-19 selain menurunnya omset penjualan pandemi covid-19 ini juga turut menghambat proses jual beli secara fisik, hampir semua pelaku UMKM melakukan aktivitas jual-beli secara fisik namun sejak adanya pembatasan mobilitas masyarakat ini berdampak pada pola belanja sehingga ada sebagian masyarakat yang memilih untuk belanja secara online namun juga banyak masyarakat yang masih memilih belanja secara langsung.

Kebiasaan baru yang dilakukan oleh masyarakat pada awal pandemi covid-19 yaitu dengan melakukan belanja secara online hal ini menjadi tantangan baru bagi pelaku UMKM di desa Tanggulrejo untuk bisa bertahan di tengah kondisi perekonomian yang menurun. Kondisi tersebut menuntut agar pelaku UMKM bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah pandemi supaya bisa tetap bertahan, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM untuk bisa menyiasati perubahan ini adalah dengan melakukan perdagangan secara online. Keberadaan *e-commerce* pada awal pandemi mempunyai peranan penting pada bidang ekonomi terutama bagi pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Di masa pandemi covid-19 bisnis *e-commerce* di Indonesia meningkat hingga 5-10 kali lipat serta bertambahnya pelanggan baru yang mencapai 51%, akan tetapi proses pengiriman atau distribusi barang mengalami keterlambatan karena adanya pembatasan transportasi selama lockdown.⁵ Dengan adanya adaptasi

⁵ Dewi Hernikawati, *Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap jumlah Kunjungan Pada Situs E-commerce Di Indonesia Menggunakan Uji T Berpasangan*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 25, No. 2 Desember 2021, hal. 193.

kebiasaaan baru tersebut pelaku UMKM di desa Tanggulrejo masih ada yang belum bisa memanfaatkan perdagangan secara online, pasalnya beberapa dari mereka tidak bisa menguasai teknologi dengan baik selain itu, pengelolaan usaha yang masih dikelola secara individu dan pengelolaan usaha yang masih belum baik terutama dalam penjualan barang menjadi salah satu permasalahan yang harus diperbaiki.

Dalam hal ini, pemerintah desa Tanggulrejo turut juga dalam memberikan dukungan bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Peran pemerintah desa sangatlah penting untuk membangkitkan serta mendorong pelaku UMKM agar bangkit kembali dari keterpurukan akibat covid-19, salah satunya dengan mengadakan pelatihan bagi pelaku UMKM yang bertujuan agar mereka bisa mengembangkan kreatifitas usahanya untuk bisa menarik daya beli masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ketentuan umum pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat.

Melihat adanya permasalahan yang terjadi pada UMKM, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota turut memberikan perhatiannya kepada UMKM khususnya

kepada usaha mikro yang tengah mengalami kesulitan di masa pandemi covid-19. Menurut Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2008, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam menangani masalah UMKM di Kabupaten Gresik. Maka dari itu, peran dinas koperasi dan UKM juga dibutuhkan oleh pelaku UMKM berbagai upaya dilakukan oleh dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk bisa mengembangkan serta melindungi pelaku UMKM. Pada masa covid-19 tidak hanya penurunan omset saja yang dirasakan oleh pelaku UMKM namun juga naiknya bahan baku juga turut mempengaruhi selain itu kebiasaan baru yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi pembelian secara online memberikan adaptasi baru bagi pelaku UMKM. Melihat hal tersebut, dinas koperasi dan UKM melakukan kerjasama dengan pihak shopee, tokopedia, bukalapak dan juga bekerjasama dengan dinas komunikasi dan informatika kabupaten Gresik hal ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM supaya bisa memanfaatkan *marketplace* tersebut untuk dijadikan sebagai tempat jualan secara online. Adapun jenis usaha yang mendominasi di Kabupaten Gresik adalah usaha mikro, di masa pandemi covid-19 peran pemerintah sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro hal ini diharapkan agar bisa menjaga kestabilan usaha mereka dari ancaman kebangkrutan.

Sebelum adanya pandemi covid-19 kondisi UMKM di Desa Tanggulrejo memberikan dampak positif yang dapat membuka lapangan

pekerjaan bagi warga sekitar. Hampir setiap bulan pelaku UMKM mendapatkan ratusan pesanan yang berasal dari masyarakat desa maupun dari luar kota akan tetapi ketika pandemi mulai masuk ke Indonesia pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo mengalami penurunan omset yang signifikan. Adanya perbedaan omset penjualan pada sebelum pandemi dan selama pandemi covid-19 yang berakibat pada menurunnya pendapatan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar sehingga banyak kegiatan sosial maupun keagamaan yang selama pandemi untuk sementara dihentikan. Perlu adanya kreatifitas yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam memasarkan produknya secara online melalui Facebook, WhtasApp, ataupun melakukan inovasi terhadap produknya. Oleh karena itu, perlu adanya riset untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di masa pandemi covid-19. Hal itulah yang mendasari peneliti untuk mengambil penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)” dengan menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan teori governance.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di masa pandemi covid-19 di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, secara garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di masa pandemi covid-19 di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil rumusan dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai peran pemerintah desa dalam melindungi UMKM pada masa pandemi, selain itu juga dapat menjadi referensi untuk penelitian yang lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dalam penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai, peran pemerintah desa dalam melindungi UMKM di masa pandemi.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan peran, pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM di masa pandemi covid-19, dan juga dapat menjadi referensi bacaan baik dikalangan akademis

maupun khalayak umum untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang lingkungan dan juga sosial politik.

E. Definisi Konseptual

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dikemukakan beberapa definisi konseptual sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa

Pemerintah merupakan organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum dan peraturan di daerah tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemerintahan sebagai sistem pelaksanaan wewenang dan kekuasaan, atau sebagai sistem pelaksanaan perintah dan memerintah. Keberadaan pemerintah adalah komponen tiga unsur penting dalam pendirian negara modern, disamping rakyat dan wilayah. Organisasi pemerintah diberikan wewenang untuk menjalankan pemerintahan salah satu tugas pokok dari pemerintah yaitu melayani kepentingan rakyat, dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah harus bersandar pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk menertibkan proses pelaksanaan. Ermaya Suryadinata, mendefinisikannya sebagai organisasi atau badan publik yang mempunyai tugas melaksanakan upaya untuk mewujudkan tujuan negara.

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah setingkat desa. Lembaga ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pimpinan pemerintah desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 14 (1) adalah kepala desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.⁶ Menurut Sumber Saparin, pemerintah desa adalah simbol resmi persatuan masyarakat desa. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, mewakili masyarakat desa untuk hubungan ke luar ataupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷

2. UMKM

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasal 1, definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki,

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa (Diakses pada 12 November 2023, pukul 9.50 WIB)

⁷ Jamaluddin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Pedesaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 111.

menguasai, atau menjadi bagian dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dan baik langsung maupun tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau bagian dari usaha kecil atau besar. Total aset, pendapatan bersih atau pendapatan penjualan tahunan sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang ini.⁸

Sebagaimana pengertian di atas, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha yang bergerak pada sektor ekonomi yang dilakukan oleh individu atau badan usaha milik perseorangan dan telah memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah.

3. Covid-19

Coronavirus adalah penyakit yang menyerang manusia dan hewan, sehingga menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 virus tersebut merupakan jenis virus baru yang bisa menyebabkan kematian,

⁸ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 *tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)* BAB 1 Pasal 1.

selanjutnya diberi nama Sindrom Pernafasan Akut Parah Coronavirus 2 (SARSCOV2) dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID19)*.⁹



⁹<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> diakses pada 6 September 2022, pukul 08.56 WIB.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berisi mengenai urian tentang hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, penelitian terdahulu ini menjadi acuan referensi untuk mengembangkan penelitian yang ada menjadi penelitian terbaru dan terupdate.

Untuk mengatasi masalah UMKM pemerintah telah memutuskan program Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang tengah mengalami kesulitan. Seperti pada penelitian yang ditulis oleh Vina Natasya & Pancawati Hardiningsih¹⁰ yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi*. Menyimpulkan bahwa adanya bantuan dari pemerintah yang berupa bantuan sosial, intensif pajak dan pemberian bantuan modal kerja mempunyai pengaruh yang baik bagi perkembangan UMKM di masa pandemi covid-19. Pemberian bantuan yang berasal dari pemerintah ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan UMKM di masa pandemi.

Dalam rangka untuk mengembangkan UMKM yang terpuruk akibat pandemi covid-19 pemerintah memberikan bantuan berupa uang bagi pelaku UMKM, dalam penyaluran bantuan tersebut mengalami masalah di

¹⁰ Vina Natasya & Pancawati Hardiningsih. *Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi*. Journal of Economics and Business, Vol. 5, No. 1, 2021

lapangan. Berdasrakan hasil penelitian yang ditulis oleh Karla Meiva Lumempow dkk¹¹ yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*. Menunjukkan bahwa terdapat masalah di lapangan dalam melakukan penyaluran BPUM yaitu banyak dari masyarakat penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria bahkan juga ada masyarakat yang tidak mempunyai usaha sama sekali namun menerima bantuan tersebut sedangkan masyarakat yang benar-benar mempunyai usaha dan termasuk dalam kriteria penerima bantuan tidak menerima BPUM.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wilfarda Charismanur Anggraeni, Wulan Puspita Ningtiyas, dll yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*.¹² Penelitian tersebut menekankan bahwa kebijakan pemberdayaaan pemerintah terhadap UMKM di Indonesia, dalam hal ini melalui beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperdayakan UMKM di masa pandemi covid-19 ini, maka pemerintah sudah menyiapkan beberapa program untuk melindungi UMKM yang terkena dampak dari pandemi ini seperti memberikan bantuan sosial kepada anggota UMKM miskin dan rentn, intensif pajak untuk UMKM, relaksasi

¹¹ Lumempow Karla Meiva, Sarah Sambiran, & Ismail Rachman. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa*. Jurnal Governance, Vol.1, No. 1, 2021.

¹² Wilfarda Charismanur Anggraeni, Wulan Puspita Ningtiyas, dll. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 3 No. 1 Juli 2021.

dan keringanan kredit bagi UMKM, perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, serta menggunakan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM dan pelatihan e-learning.

Dalam menangani masalah UMKM, pemerintah pusat memerlukan bantuan dari pemerintah daerah guna menjangkau UMKM hingga ke penjuru negeri. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM, berbagai cara dan upaya dilakukan untuk bisa membangkitkan serta mengembangkan UMKM yang mengalami ancaman kebangkrutan. Seperti penelitian yang ditulis oleh Hamami Cahya Prastika¹³ yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magelang*. Peran pemerintah daerah berhasil dalam meningkatkan kualitas produksi kerajinan kulit sehingga mampu menjadikan sebagai produk unggulan di Kabupaten Magetan akan tetapi dalam produksi kerajinan kulit ini terkendala pada SDM yang semakin berkurang dan mempunyai skill yang rendah.

Penelitian Alfu Nur Auliya¹⁴ yang berjudul *Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Menyimpulkan bahwa

¹³ Hamami Cahya Prastika. Skripsi. *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magelang*. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).

¹⁴ Alfu Nur Auliya. Skripsi. *Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021.

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magelang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM banyak pelaku UMKM yang pendapatannya berkurang bahkan ada juga yang berhenti bekerja melihat kondisi pelaku UMKM tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magelang memberikan dukungan seperti mengadakan pelatihan atau kegiatan penunjang dengan memberikan bantuan yang berupa peralatan produksi hal ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM agar bisa bangkit dan melanjutkan usahanya lagi.

Pemerintah juga memberikan fasilitas berupa sarana prasarana untuk bisa membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya seperti penelitian yang dilakukan oleh Tumija, yang berjudul *Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Cipageran, Cimahi*.¹⁵ Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dengan memberikan sarana prasana dan fasilitas pelatihan tentang digital marketing, peningkatan SDM, pelatihan pengembangan produk, sebagai regulator pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan bagi pelaku UMKM serta menjalankan tugas sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kota Cimahi. Sedangkan peran

¹⁵ Tumija, *Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Cipageran, Cimahi*. Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment, Volume 2 Nomor 1, 2022.

pemerintah sebagai katalisator yaitu dengan memberikan bantuan modal yang berupa alat teknologi dan bantuan pakan ternak yang bertujuan untuk meningkatkan produksi susu.

Adapun penelitian lain juga dilakukan oleh Fajar Supanto, dkk. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM yang Terdampak Covid-19.*¹⁶ Dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa Pemerintah telah memperkenalkan stimulus fiskal dan moneter untuk membantu UMKM. Dukungan tambahan seperti: menjadikan UMKM sebagai prioritas untuk meningkatkan skema perlindungan sosial dan PEN, mempercepat akses UMKM terhadap uang tunai dan pembiayaan jangka pendek serta dukungan pemerintah untuk pengembangan saluran dan penyelarasan program antar lembaga diperlukan untuk mendukung keberlangsungan dan pengaktifan kembali UMKM.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Utami Maulidya Ningsih yang berjudul *Peran Pemeirntah Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah.*¹⁷ Membahas tentang bagaimana peran pemerintah Desa Tunas Baru dalam mengembangkan UKM CITATITA, pada tahun 2019-2020 UMKM tersebut merupakan satu-satunya UMKM yang berada di Desa Tunas Baru. Hasil dari penelitian ini peran pemerintah Desa Tunas Baru dalam pengembangan UKM berdasarkan program atau kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah

¹⁶ Fajar Supanto, dkk. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM yang Terdampak Covid-19.* KARTA RAHARJA, Vol. 2, No. 1, 2021.

¹⁷ Utami Maulidya Ningsih. Skripsi. *Peran Pemerintah Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), hal. 8.

desa tersebut dinilai masih lemah. Pasalnya program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tunas Baru masih terbatas pada perbaikan infrastruktur desa seperti perbaikan dan pembangunan SD, TK dan TPQ, pembangunan balai desa, dan lain-lain dalam skala desa. Disisi lain pemerintah desa tersebut berupaya untuk bisa memberdayakan masyarakat serta mengembangkan UMKM dengan cara meningkatkan kualitas SDM, memberikan bantuan modal usaha, pelatihan tentang pemasaran dan penggunaan teknologi bagi masyarakat yang minim pengetahuan akan teknologi.

B. Kerangka Teori

1. Studi Tentang Pemerintah

Dinamika politik dan pemerintahan dapat dipahami secara lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi sosial (masyarakat), dan ditandai dengan lahirnya konsep demokrasi modern dan munculnya *civil society*. Governance mendefinisikan tiga bidang penting untuk dipertimbangkan ketika mempelajari ilmu politik dan pemerintahan: negara, masyarakat, dan pasar.

Pemerintahan dengan demikian diposisikan sebagai tempat di mana hubungan kekuasaan yang terkait dengan urusan publik berlangsung. Lebih jelas bagaimana relasi kuasa terjadi di masing-masing domain (negara, pasar, dan masyarakat) dan bagaimana relasi kuasa di antara ketiga ranah tersebut terjadi dalam persaingan memperebutkan urusan publik. Penggunaan istilah governance sebagai konsep yang berbeda

dengan government, mulai dipopulerkan secara efektif oleh bank dunia sejak tahun 1989. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan masyarakat sipil harus bekerja sama membangun konsensus bahwa negara tidak lagi normatif tetapi hanya fasilitatif. Dengan demikian, legitimasi dan konsensus politik yang menjadi pilar utama good governance versi Bank Dunia hanya dapat dibangun dengan melibatkan seluas-luasnya aktor non-negara dan membatasi partisipasi negara.¹⁸

Konsep governance yang mengatur keseimbangan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi konsep penting yang mengubah paradigma tentang peran masyarakat di dalam pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat tidak lagi sebagai penerima manfaat atau hanya objek, tetapi sebagai agen pembangunan yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan tersebut.¹⁹ Dalam mengelola sektor publik aktor pemerintah (*state* atau *government*) tidak lagi menjadi penentu, akan tetapi sudah harus berbagi peran dengan actor non pemerintah yaitu dunia usaha (*private*) dan komunitas (*civil society*). Menurut Koiman mendefinisikan governance sebagai proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat campur tangan pemerintah dalam

¹⁸ Cornelis Lay dan Wawan Masudi, *Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 9, Nomor 2, 2005. Hal. 227.

¹⁹ Syamsurizaldi, Alfian Miko, dkk. *Model Community Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Nagari Taram Kecamatan Haray Kabupaten Lima Puluh Kota*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 12 No 1, 2021. Hal 36.

kepentingan tersebut. Tata kelola pemerintahan mencakup semua mekanisme, proses dan kelembagaan yang digunakan oleh warga dan kelompok masyarakat untuk mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum mereka, memenuhi kewajiban serta menjembatani perbedaan diantara mereka.

Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (good governance), setiap pejabat publik, politikus, dan birokrasi harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas segala sikap, perilaku, dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang diembannya. Pemerintah pada dasarnya adalah pelayanan kepada masyarakat. pemerintah bukan untuk melayani diri sendiri, kelompoknya, atau keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi bagi semua anggota masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya guna mencapai tujuan bersama.

Menurut Rosidi dan Fajriani terdapat tiga aktor yang berpengaruh dalam proses governance yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga pihak saling bekerja sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.²⁰ Pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor yang memonopoli penyelenggaraan pemerintahan, melainkan membutuhkan aktor lain karena kapasitas pemerintah yang terbatas.

²⁰ Abidarin Rosidi, & Rinatania Anggraeni Fajriani, *Reinventing Local Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Cv. Andi Offset), hal. 10.

Pihak swasta harus dapat membantu pemerintah melalui dukungan finansial dalam penyelenggaraannya. Dalam hal ini swasta tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri yaitu hanya mencari keuntungannya pribadi. Selain itu, masyarakat harus berperan aktif dan perlu untuk diberikan ruang. Akan sia-sia jika masyarakat memang mempunyai niat yang kuat untuk ikut dalam pengelolaan pemerintahan tetapi tidak diberi ruang. Partisipasi masyarakat akan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat di masa yang akan datang.

2. Pandemi Covid-19 dan Peran Pemerintah Daerah di Masa Pandemi

A. Bencana Covid-19

Corona virus merupakan penyakit yang menyerang pernapasan. Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan Cina dan menyebar dengan cepat keseluruh dunia. *World Health Organization (WHO)* sebagai lembaga kesehatan dunia memberi nama penyakitnya sebagai *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)*, berbagai cara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19 salah satunya dengan melakukan vaksinasi, program vaksin ini dilakukan sejak awal tahun 2021 jenis vaksin yang digunakan Indonesia yaitu sinovac, astra zeneca, pfizer, moderna, sinopharm, dan novavax.

Virus yang menyebabkan Covid-19 disebut dengan Sars-CoV-2. Coronavirus bersifat zoonosis (menyebarkan antara hewan dan

manusia), berdasarkan penelitian SARS disebarkan oleh kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Sedangkan hewan yang menjadi sumber penularan covid-19 masih belum diketahui.²¹ Gejala umum yang dialami oleh penderita covid-19 yaitu batuk kering, demam dan sesak nafas selain itu beberapa dari penderita covid-19 mengalami gejala lain yang kurang umum meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki.

Penyakit ini dapat menular melalui droplet (tetesan kecil) yang keluar dari hidung atau mulut saat batuk atau bersin. Tetesan itu kemudian jatuh pada benda-benda disekitarnya, jika ada orang lain yang menyentuh benda yang terkontaminasi droplet tersebut kemudian orang tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut (segitiga wajah) maka orang tersebut dapat terinfeksi covid-19. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan untuk berjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

²¹ <https://www.kemendes.go.id/article/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html> diakses pada 5 Desember 2022 pukul 18.33 WIB.

B. Bencana Covid-19 dari Global ke Lokal

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan munculnya virus covid-19, virus tersebut pertama kali terdeteksi di Wuhan China yang kemudian menyebar keseluruh dunia hingga WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia menetapkan bahwa corona virus disease (Covid-19) sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Sebanyak 126.000 orang dari 123 negara telah terinfeksi covid-19 dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan penyebaran kasus covid-19 menyebar di Asia, Eropa, Amerika Serikat, hingga Afrika Selatan.²² Dalam hal ini, WHO telah memberikan peringatan kepada pemerintah semua negara untuk meningkatkan kesiapannya dalam menangani pandemi covid-19.

Semakin banyaknya angka kasus covid-19 hingga beberapa negara melakukan karantina massal (lockdown), China menjadi negara yang pertama kali menerapkan lockdown kemudian disusul oleh Italia yang menerapkan lockdown akibat lonjakan kasus covid-19 dan juga sempat menjadi negara dengan jumlah kematian akibat covid-19 paling banyak di dunia, Denmark juga menjadi kedua di Eropa yang menerapkan lockdown nasional yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran covid-19, selain itu Irlandia, El Salvador Polandia, Selandia Baru, Spanyol, Filipina, Lebanon dan

²² Gloria Setyvani Putri, *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global*, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global> Diakses pada 6 Desember 2020, pukul 12.27 WIB.

juga Perancis juga memberlakukan lockdown yang bertujuan untuk membendung angka penyebaran covid-19.²³

Hampir semua sektor mulai dari perekonomian, politik, sosial, budaya yang turut mengalami dampak dari pandemi ini. Pandemi ini memberikan dampak pada sektor perekonomian dunia hingga mengancam terjadinya resesi, negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Selandia Baru dan Perancis turut merasakan dalam jurang resesi. Hal ini juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi domestik menyusut menjadi 5,32% dalam dua kuartal berturut-turut. Berdasarkan *International Monetary Fund* (IMF) ekonomi global telah memasuki krisis ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan 95% negara diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. IMF juga menilai bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan kerugian ekonomi global sebesar 12 triliun dollar AS atau sekitar Rp 168.000 triliun (kurs Rp 14.000). Sementara itu, *World Economic Outlook* (WEO) mencatat bahwa pandemi covid-19 telah mengubah lanskap perekonomian dunia yang berujung pada *Great Depresson*.²⁴

²³ Rehia Sebayang, *Termasuk China, Ini 11 Negara Yang Lockdown Gegara Covid-19*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200316115516-4-145119/termasuk-china-ini-11-negara-yang-lockdown-gegara-covid-19/2> Diakses pada 6 Desember pukul 13.03 WIB.

²⁴ Bambang Arianto, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Dunia*, Jurnal Ekonomi Perjuangan, Volume 2, No. 2 Tahun 2020. Hal. 108.

Pada awal Maret 2020 dua warga negara Indonesia terdeteksi positif kasus covid-19 hingga pada 9 April 2020 pandemi menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak terpapar virus corona. Setelah mengkonfirmasi adanya kasus covid-19 yang masuk ke Indonesia, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik termasuk dalam untuk tidak melakukan panik buying. Penularan kasus covid-19 di Indonesia begitu cepat penyebarannya dalam waktu kurang dari dua minggu angka positif covid mencapai 69 orang, 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 5 orang dinyatakan sembuh. Pemerintah telah menetapkan bahwa covid-19 merupakan penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka dari itu pemerintah menetapkan bahwa pandemi covid-19 merupakan bencana nasional. Dalam hal ini, covid-19 termasuk dalam bencana non alam yang dapat merenggut banyak nyawa dan memberikan dampak negatif dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menekan angka penyebaran covid-19 salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan pada 1 April 2020. Adapun provinsi yang mengajukan PSBB pertama yaitu DKI Jakarta yang menjadi wilayah dengan

angka covid-19 paling banyak di Indonesia. Semenjak masuknya covid-19 ke Indonesia, pemerintah telah menyiapkan beberapa upaya untuk memerangi virus covid-19 mulai dari penyekatan pintu masuk ke Indonesia di beberapa titik bandara dan pelabuhan serta menyediakan fasilitas kesehatan yang cukup. Di samping itu, pemerintah juga bersedia menjamin biaya pengobatan masyarakat yang terinfeksi covid-19 dan menyediakan lebih dari 100 rumah sakit di seluruh Indonesia.²⁵

Untuk menekan angka penyebaran covid-19 pemerintah telah melakukan berbagai upaya karantina wilayah, hingga PSBB, PPKM, menghentikan beberapa penerbangan ke banyak negara, pembatasan transportasi baik di darat maupun laut, bahkan beberapa dari industri berhenti produksi. Selain itu, pergerakan manusia baik antar negara maupun antar provinsi, kabupaten juga dipantau oleh pemerintah hal ini berdampak pada aktivitas perekonomian hal ini dikarenakan adanya pembatasan terhadap ruang gerak masyarakat. Pada awal tahun 2021 program vaksinasi covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyuntikan vaksin covid-19 ini Presiden Joko Widodo merupakan orang yang pertama kali disuntik vaksin covid-19 jenis sinovac. Proram vaksinasi covid-19 menjadi isu penting untuk dilakukan, pasalnya dengan adanya vaksinasi tersebut

²⁵ Eko G. Samudro, *Pemerintah Indonesia Menghadapi Benana Nasional Covid-19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional*, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 26, No. 2 Tahun 2020, hal. 135.

diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Indonesia, memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan, dan keamanan serta menjadi langkah awal berkontribusi dalam memerangi dampak yang ditimbulkan akibat wabah covid-19. Selain itu, tentunya juga membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

C. Pemerintah Daerah dan Mitigasi Covid-19

Dalam menangani masalah covid-19, pemerintah pusat tidak dapat bertindak sendiri dan memerlukan bantuan dari pemerintah daerah yang bertugas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat agar bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri. Pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam mengaplikasikan kebijakan di lapangan, meskipun pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dikarenakan semuanya sudah terpusat di pemerintahan pusat.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam upaya pengendalian penyebaran covid-19 dan kaitannya memiliki kewenangan zona. Berdasarkan norma hukum sebagai landasan dasar kewenangan daerah, daerah dapat menjalankan otoritas jangkauan kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang ditentukan sebagai tanggung jawab pusat. Dengan kata lain, pengelolaan pemerintah daerah masih membutuhkan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Pada awal pandemi covid-19 jumlah

Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Dalam Resiko (ODR) serta Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kabupaten Gresik cukup banyak, maka dari itu pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa daerah tersebut masuk dalam darurat pandemi covid-19. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemkab Gresik untuk mencegah penyebaran covid-19 mulai dari menerapkan PSBB di beberapa kecamatan hingga mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2020 tentang pedoman masa transisi menuju tatanan baru. Dalam perbup tersebut mengatur ketertiban masyarakat di tengah situasi covid-19, selain mengatur tentang masalah protokol kesehatan perbup tersebut juga berisi sejumlah langkah pendukung yang wajib dilakukan Forkopimda dan jajaran OPD dalam mengedukasi masyarakat mengenai virus covid-19.²⁶ Di dalam peraturan bupati tidak hanya mencakup edukasi secara massif mengenai protokol kesehatan covid-19 dan PHBS di masyarakat namun juga mengatur sanksi bagi individu, kelompok maupun pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam perbup tersebut. Dalam melaksanakan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri.

²⁶ Hamzah Arfah, *Upaya Pemkab Gresik Menekan Kasus Covid-19 Selama 2 Pekan*, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/10/18363851/upaya-pemkab-gresik-menekan-kasus-covid-19-selama-2-pekan?page=all> Diakses pada 7 Desember 2022 pukul 19.57 WIB.

Pada masa transisi terjadi lonjakan kasus covid-19 di Kabupaten Gresik sehingga daya tampung rumah sakit rujukan pasien covid-19 di Gresik mengalami overload termasuk rumah sakit Ibnu Sina yang pada waktu covid-19 untuk sementara tidak menerima pasien non covid-19. Melihat angka positif covid-19 di Gresik meningkat pemerintah Kabupaten Gresik mengubah stadion Gelora Joko Samudro dijadikan sebagai tempat isolasi bagi warga Gresik yang positif covid-19 dengan dialihfungsikan stadion tersebut demi meningkatkan angka kesembuhan dan menekan penularan covid-19. Langkah yang tepat untuk menjadikan Gelora Joko Samudro (GJS) sebagai tempat untuk isolasi pasien covid-19 guna mempercepat penanganan covid-19 di Gresik. Adapun fasilitas yang sudah disiapkan oleh Pemkab Gresik untuk menangani kasus covid-19 di GJS yaitu menyediakan ruang perawatan yang sesuai dengan tingkat kedaruratan pasien mulai dari zona merah, hijau, hingga kuning. GJS memiliki 140 tempat rehabilitasi, yakni 80 tempat tidur disiapkan untuk zona merah, 40 untuk zona kuning, dan 20 untuk zona hijau. Jumlah tersebut dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan pelayanan. Pemkab Gresik juga menyediakan tempat tidur bagi tenaga medis selain itu juga terdapat kamera CCTV untuk memantau aktivitas pasien selama dalam perawatan.²⁷

²⁷ Mohamad Nur Asikin, *Jadikan GJS Tempat Isolasi Pasien Covid-19* <https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/surabaya/29/07/2020/jadikan-gjs-tempat-isolasi-pasien-covid-19/%3famp> Diakses pada 8 Desember 2022, pukul 09.56 WIB.

Pemerintah Kabupaten Gresik juga melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas umum seperti kantor-kantor, masjid, sekolah, pasar serta menyediakan masker dan hand sanitizer di perkantoran. Selain itu, pemberian bantuan yang berupa sembako diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak wabah covid-19 yang bermukim di wilayah zona merah covid-19.

3. Peran Pemerintah Desa dalam Penanganan Covid-19

A. Desa Sebagai Kapanjangan Tangan Pemerintah Kabupaten

Penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) yang telah berkembang menjadi pandemi global berdampak signifikan terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat pedesaan. WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dan pemerintah Indonesia telah menetapkan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Dalam hal ini masyarakat desa sangat merasakan dampak dari keadaan tersebut, sehingga pemerintah desa sebagai lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat desa membutuhkan regulasi yang tepat untuk membantu warga desa yang terdampak Covid-19. Sebagai kapanjangan tangan dari kabupaten, desa sebagai satuan pemerintahan terendah melaksanakan kebijakan yang telah diatur dalam peraturan bupati tentang penanganan pandemi covid-19 di

tingkat desa. Dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa Tanggulsejo dalam menaggulangi covid-19 di tingkat desa dengan melakukan pengadaan peralatan kesehatan dengan memberikan masker dan hand sanitizer yang dibagikan kepada seluruh masyarakat Desa Tanggulsejo.

Pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Tanggulsejo dalam penanganan covid-19 yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gresik dengan melakukan pengecekan kepada warga yang datang dari luar daerah ataupun warga yang bekerja di luar daerah yang tidak dapat dilakukan secara online/daring, dalam melakukan pemantauan tersebut melibatkan RT atau RW setempat.

Ketentuan lain yang berlaku adalah pendirian posko desa, sebagai bagian dari pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19, atau yang dikenal di desa. Dalam menjalankan fungsi posko desa dibentuk kelompok yang diketuai oleh kepala desa dan diwakilkan oleh ketua BPD yang terdiri dari:

1. Kelompok pencegahan dari unsur pelaksana wilayahnya meliputi , RW, RT, Satlinmas, PKK, Karang Taruna, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat terpilih lainnya,

2. Tim Penanganan terdiri dari unsur RW, RT, Dokter, Bidan Desa, Perawat, Kader Kesehatan, Kader Posyandu, tenaga kesehatan lainnya,
3. Tim pembina meliputi unsur RW, RT, Satlinmas, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat,
4. Tim pendukung yang terdiri dari komponen perangkat desa dengan koordinator Sekdes.²⁸

B. Desa dan Penanganan Covid-19

Pencegahan dan penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan merupakan hal penting dalam hal ini pemerintah Desa Tanggulrejo menyediakan fasilitas tempat isolasi mandiri bagi warga Desa Tanggulrejo yang terkonfirmasi covid-19. Adapun tempat tersebut merupakan bangunan puskesmas lama yang dialihfungsikan sebagai tempat isolasi covid-19, penyemprotan disinfektan juga dilakukan oleh pemerintah desa Tanggulrejo ke beberapa tempat yang dibantu oleh ketua RT setempat.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Covid-19 masih sangat beragam. Keadaan ini disebabkan karena pengetahuan dan kesadaran masyarakat tidak dapat diubah dalam waktu singkat. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Covid-19 dapat dibagi menjadi tingkat kepercayaan, keraguan, dan

²⁸ <https://covid19.go.id/p/berita/keterlibatan-desa-dalam-penanganan-covid-19#> Diakses pada 10 Desember 2022 pukul 08.19 WIB

penolakan/ketidakpercayaan.²⁹ Maka dari itu, pemerintah desa Tanggulrejo gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pandemi covid-19, peran masyarakat desa juga mempengaruhi dalam pencegahan penanganan covid-19 di tingkat desa. Upaya sosialisasi mengenai pandemi covid-19 dilakukan oleh pemerintah desa Tanggulrejo melalui ketua RT dan RW setempat yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 adalah upaya seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan potensi masyarakat agar memiliki daya dan kemampuan untuk bertindak dan mencegah penyebaran Covid-19.

Dampak covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat desa namun juga pada semua aspek perekonomian penduduk desa. Maka dari itu, pemerintah desa melalui peraturan kepala desa menentukan masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan musyawarah desa, dalam penyaluran BLT dampak covid-19 melibatkan ketua RT, RW, BPD dan tokoh masyarakat.

4. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

²⁹ Eka Afrina Djamhari, dkk. *Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan (Persepsi dan Partisipasi Masyarakat)*, (Jakarta: PRAKARSA, 2022) hal. 37.

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa mempunyai peranan penting dalam mengembangkan UMKM di tingkat desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ketentuan umum pasal 1 ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat.³⁰

Pengaturan keberadaan desa melalui UU No 6 Tahun 2014 hal ini dinilai dapat memberikan peluang bagi pengembangan pemerintahan desa sendiri. Dalam hal kewenangan, terdapat tambahan kewenangan desa selain kewenangan yang berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh negara. Nampaknya asas subsidiaritas yang mendasari hukum desa memberikan keleluasaan dalam membentuk kewenangan di tingkat lokal dan membuat keputusan lokal yang menguntungkan masyarakat desa.³¹ Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut lebih

³⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 12

³¹ Muhadam Labolo, *Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 7, NO. 2 Desember 2017, hal. 76.

mengutamakan peran desa secara otonom dengan keunikan hak-hak asal-usulnya (recognisi).

Selain itu, di dalam pemerintahan desa terdapat otonomi desa. Otonomi desa merupakan hak, kewajiban, dan wewenang dalam pengelolaan, pengaturan, pemerintahan sendiri yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan hak tradisional dan adat istiadat masyarakat untuk berkembang mengikuti perkembangan global.³² Melalui otonomi desa ini, pemerintah dapat memberdayakan masyarakat melalui prinsip demokrasi, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan berfokus pada potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk mencapai pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat membutuhkan dukungan dari pengelolaan pembangunan pemerintah desa yang partisipatif dan proaktif. Maka dari itu, peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di masa pandemi tentunya sangat diperlukan agar dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada.

Terdapat struktur sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat membantu meminimalkan patologi sosial. Selama masa pandemi covid-19 pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo mengalami penurunan omset hingga 50% hal ini dikarenakan adanya peraturan terkait PSBB dan PPKM yang membatasi masyarakat untuk melakukan kegiatan di luar

³² Elisabeth Lenny Marit, dkk. *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 25.

rumah. Selain itu, dalam keadaan covid-19 pelaku UMKM diharapkan mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan sosial, kemudian membuat tujuan yang jelas. Berdasarkan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons mengasumsikan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial akan berfungsi dalam pengaturan atau struktur lain sehingga jika lembaga atau struktur dalam masyarakat tidak ada atau tidak berfungsi, maka hukum dalam masyarakat tidak akan ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, struktur tersebut tidak akan berfungsi karena struktur dan fungsi di suatu masyarakat berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Dalam teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parson terdapat empat konsep tentang teori AGIL yang mengacu pada setiap kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari sebuah sistem berisi empat persyaratan mutlak yang harus ada agar masyarakat dapat berfungsi. Adapun empat persyaratan tersebut adalah Adaption, Goal Attainment, Integration, dan Latency.³³

Suatu sistem sosial memiliki beberapa unsur sosial yang saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Melalui teori AGIL ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah desa Tanggulrejo dalam mengembangkan UMKM pada masa pandemi

³³ George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 54-55.

covid-19 yaitu : *Adaptation*, sistem sosial dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan beradaptasi dengan kebutuhan pokok. *Goal attainment*, menentukan tujuan dan keinginan yang sama untuk dicapai. *Integrasi*, mengatur hubungan yang erat dengan masyarakat sehingga saling berkesinambungan. *Latency*, semua sistem yang diterapkan harus dipelihara dan saling melengkapi.

Lahirnya UU Nomor Tahun 2014 tentang desa telah membawa angin segar untuk mempercepat pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Salah satu perubahan yang mencolok yaitu pengakuan fungsi desa sebagai masyarakat berpemerintahan sendiri yang seakan dengan pemerintah daerah. Artinya, keberadaan desa tidak hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah tingkat atas, tetapi juga diakui sebagai komunitas yang mempunyai wewenang dalam mengatur urusan rumah tangganya (otonomi) sendiri sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dengan berkembangnya kondisi sosial pedesaan, harapan tersebut tentu saja tidak mudah diwujudkan meskipun kebijakan tersebut telah memberikan peluang seluas-luasnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai serta jenis penelitian yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mempelajari, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan dengan menggunakan metode kuantitatif.³⁴ Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan tradisi khas dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan orang-orang pada bidangnya dengan melibatkan orang-orang tersebut di dalam bahasa dan peristilahannya.³⁵

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti keadaan suatu objek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci.³⁶ Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau

³⁴ Harahap, Nursaripa. *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), hal 123.

³⁵ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hal.30.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.9.

gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.³⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif. Suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada dilakukan secara sistematis, tekstual dan akurat dalam kaitannya dengan karakteristik populasi atau wilayah tertentu.³⁸ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau representasi fakta yang sistematis dan akurat secara faktual terkait dengan fenomena yang diteliti.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode mendeskripsikan fenomena yang dituangkan dalam tulisan ilmiah dan bahasa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dan tempat yang menjadi kondisi sosial yang akan diteliti.³⁹ Adapun lokasi penelitian yang dilakukan berada di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik lokasi tersebut sesuai dengan judul yang diteliti dan

³⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis&Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 21-22.

³⁸ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 54.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal 292.

lokasi kedua berada di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik.

Riset ini dilakukan di beberapa tempat antara lain:

1. Lokasi pertama dilaksanakan di kantor pemerintahan yaitu di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang berada di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik.
2. Lokasi kedua, dilaksanakan di kantor IT desa dengan ketua UMKM Desa Tanggulrejo yang berada di Jl. Dr. Soetomo Rt 01 Rw 01, Tanggulrejo Utara, Kec. Manyar, Kab. Gresik.
3. Lokasi ketiga, dilaksanakan di kantor pemerintahan tingkat desa yang berada di Desa Tanggulrejo RT 01, RW 01 Tanggulrejo Utara, Kec. Manyar, Kab. Gresik.
4. Lokasi keempat, dilaksanakan di rumah pelaku UMKM yang berada di Desa Tanggulrejo tepatnya di Jl. Dr. Soetomo Rt 01 Rw 01 lokasi ini berada di kediaman Ibu Siti Zaitin yang merupakan pelaku UMKM di bidang Arumanis & Madumongso.
5. Lokasi kelima, dilaksanakan di kediaman Ibu Thoyyibah yang merupakan pelaku UMKM di bidang produksi roti dan nasi kotak, adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jl. Dr. Soetomo RT 01 RW 01 Tanggulrejo Utara Kec. Manyar, Kab. Gresik.

6. Lokasi keenam. Dilaksanakan di rumah Ibu Istilah yang merupakan pelaku UMKM di bidang produksi crispy ikan bertempat di Jl. Ikan Mas Rt 07 Rw 02 Tanggulrejo Selatan Kec. Manyar, Kab. Gresik.
7. Lokasi ketujuh. Dilaksanakan di rumah Ibu Rosyidah yang merupakan pelaku UMKM di bidang produksi kerupuk bertempat di Jl. Ikan Bader Rt 10 Rw 02 Tanggulrejo Selatan, Kec. Manyar, Kab. Gresik.
8. Lokasi Ke delapan. Dilaksanakan di rumah Ibu Iza selaku pelaku UMKM di bidang cake bertempat di Jl. Ikan Bandeng Rt 09 Rw 02 Tanggulrejo Selatan, Kec. Manyar, Kab. Gresik.
9. Lokasi kesembilan. Dilaksanakan di kediaman Ibu Umu Kholidah yang merupakan pelaku UMKM di bidang makanan berupa mie dan jajanan pasar, bertempat di Jl. Ikan Mas Rt 07 Rw 02 Tanggulrejo Selatan, Kec. Manyar, Kab. Gresik.
10. Lokasi kesepuluh. Dilaksanakan di tempat pak Maimun yang merupakan pelaku UMKM di bidang makanan berupa pentol, bertempat di Rt 16 Rw 01 Tanggulrejo Utara, Kec. Manyar, Kab. Gresik.

b) Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan atau dijadwalkan selama kurang lebih 3 bulan terhitung mulai bulan Agustus s/d Oktober 2022.

C. Pemilihan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subyek penelitian bisa disebut sebagai informan. Menurut Muhammad Idrus, subjek penelitian mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, objek, atau organisme yang menjadi sumber informasi yang dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Subjek penelitian berkaitan erat dengan informasi atau sumber data penelitian dalam penelitian kualitatif, dan subjek penelitiannya adalah “orang dalam” sebagai sumber informasi di lingkungan penelitian. Subjek penelitian juga diartikan sebagai orang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penelitian.⁴⁰ Sedangkan Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian sebagai suatu benda, hal atau orang yang menjadi tempat dimana variabel penelitian tersebut melekat dan yang dipermasalahkan.⁴¹ Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian yang berkaitan erat dengan responden, dalam sebuah penelitian informan sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam pengumpulan data maupun informasi yang dibutuhkan.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa kriteria untuk menentukan subjek penelitian yaitu: mereka telah lama terlibat dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian, mereka turut berpartisipasi sepenuhnya dalam bidang atau kegiatan tersebut, mereka

⁴⁰ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hal 61-62.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal 80-81.

memiliki waktu yang luang untuk dimintai informasi.⁴² Maka dari itu, subjek penelitian ini adalah :

1. Bapak Abdul Karim Ali selaku Kepala desa Tanggulrejo,
2. M. Ibrahim Adham Karim selaku ketua UMKM
3. Pak Koes Soedarsono selaku pelaksana bidang koperasi usaha mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
4. Ibu Siti Zaitin selaku pelaku UMKM dibidang makanan yang menjual arumanis dan madumongso
5. Ibu Thoyyibah selaku pelaku UMKM dibidang produksi roti dan nasi kotak
6. Ibu Istilah selaku pelaku UMKM dibidang produksi crispy ikan
7. Ibu Rosyidah selaku pelaku UMKM di bidang produksi kerupuk
8. Ibu Izza selaku pelaku UMKM di bidang produksi cake
9. Ibu Umu Kholidah selaku pelaku UMKM dibidang makanan yang memproduksi mie dan jajanan pasar
10. Bapak Maimun selaku pelaku UMKM di bidang makanan yang berupa pentol.

Dengan dipilihnya beberapa informan tersebut, maka peneliti yakin akan mendapatkan informasi atau data-data yang signifikan sesuai dengan judul yang akan diteliti.

⁴² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 188.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini terdiri dari beberapa langkah penelitian masing-masing langkah dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Setelah mempersiapkan semua aspek dari tahap pra lapangan, peneliti terlebih dahulu mulai turun ke lokasi untuk melakukan observasi, kemudian proses pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengamati objek penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti diharapkan mampu memahami tentang situasi dan kondisi di lapangan sehingga peneliti bisa menyesuaikan penampilan dan perilakunya sesuai dengan norma, nilai-nilai, kebiasaan serta adat istiadat selama berada di lokasi penelitian. Ketika berada di lokasi penelitian, sebaiknya peneliti bisa bersikap baik dengan subjek-subjek penelitian sehingga bisa memudahkan peneliti dalam mencari informasi atau data yang valid serta memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Tahap pra-lapangan ini meliputi penyusunan rencana penelitian, artinya sebelum melakukan penelitian langsung, peneliti mempersiapkan atau merancang rencana penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti ketika sudah turun ke lapangan. Untuk bisa menyusun rancangan penelitian, maka peneliti harus memahami objek penelitian yang ada di lapangan yaitu tentang kebijakan UMKM di Desa Tanggulrejo & dinamika pelaku UMKM, pemerintah desa serta dinas

koperasi dan UKM dalam mengembangkan UMKM di masa pandemi covid-19. Selain itu, peneliti juga harus menyiapkan rancangan terkait penggalan data terhadap informan. Dalam penelitian kualitatif mengutamakan etika penelitian sangat penting karena peneliti berhadapan dengan orang-orang dan dalam lokasi penelitian peneliti adalah orang baru. Oleh karena itu peneliti harus menerima dan mentaati peraturan yang ada di lokasi penelitian.

b. Tahap Lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan penelitian di tempat penelitian yaitu di Desa Tanggulrejo dan di dinas koperasi dan UKM Kabupaten Gresik. Dalam tahap lapangan peneliti mengumpulkan data yang sesuai dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti diharapkan mampu menyesuaikan diri dan mentaati peraturan yang ada di lokasi penelitian serta menjalin hubungan yang baik dengan objek penelitian hal ini bertujuan agar memudahkan peneliti mendapatkan data atau informasi yang valid.

c. Tahap Analisis

Setelah melakukan kegiatan lapangan tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis data. Peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian data tersebut diolah dan disusun sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti.

Pada tahap ini, peneliti menjawab semua pertanyaan yang tertulis dalam rumusan masalah serta membuat suatu kesimpulan yang mudah dipahami.

d. Tahap Penulisan Laporan

Tahap terakhir yaitu penulisan laporan, pada tahap ini peneliti mulai menulis semua hasil yang diperoleh di lapangan sesuai dengan penulisan karya tulis yang sudah ditentukan. Pada tahap ini, peneliti harus menulis sesuai dengan hasil yang diperolehnya dari narasumber/informan dan tidak mengurangi atau menambahi data yang tidak dibutuhkan. Proses penulisan laporan ini harus sesuai dengan peraturan penulisan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menjadi langkah yang paling strategis, karena dalam penelitian tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data.⁴³ Dalam penelitian, peneliti harus menentukan teknik pengumpulan data yang paling tepat untuk digunakan agar benar-benar mendapatkan data yang valid dan reliabel.⁴⁴ Maka dari itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 224.

⁴⁴ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hal 173.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung.⁴⁵ Menurut S. Margono Observasi didefinisikan sebagai pengamatan sistematis dan pencatatan gejala yang terjadi pada subjek penelitian. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek pada titik kejadian atau berlangsungnya peristiwa.⁴⁶ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh data yang spesifik tentang objek penelitian. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan lingkungan yang diteliti, kegiatan yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan makna peristiwa dari perspektif peristiwa yang diamatinya.

Pada penelitian kali ini observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanggurejo dan pelaku UMKM, mengamati keadaan lingkungan desa dan mengamati perilaku subyek selama proses wawancara.

Peneliti melakukan observasi dengan mendatangi subyek, yakni pelaku UMKM, Kepala Desa Tanggurejo, Ketua UMKM, dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik.

⁴⁵ Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm 26.

⁴⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati., 173.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi melalui dialog langsung antara peneliti dan pemberi informasi baik menggunakan pedoman wawancara atau tidak.⁴⁷ Teknik wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan efisien dari informan yang dipilih oleh peneliti sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan peneliti terdiri dari berkomunikasi dan mengajukan pertanyaan tertulis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat tulis, alat recorder, kamera serta alat pendukung lainnya.

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur baik kepada kepala desa Tanggulsejo, ketua UMKM, pelaku UMKM maupun kepada pihak dinas koperasi dan UKM. Alasan peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur adalah supaya peneliti bisa mengajukan pertanyaan kepada informan secara mendalam sehingga mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam melakukan wawancara peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara agar proses wawancara berjalan dengan lancar dan pembahasannya tidak merambah luas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, rekaman saat wawancara, dll. Dokumentasi

⁴⁷ Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm 133.

dapat digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari informan, dan dokumentasi dapat digunakan sebagai bukti bahwa peneliti melakukan kerja lapangan tanpa rekayasa sedikitpun. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

Dalam hal ini studi dokumentasi merupakan cara mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan untuk masalah penelitian kemudian dikaji secara mendalam untuk dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁴⁸ Dokumentasi yang digunakan pada penelitian kali ini berasal dari arsip data pemerintah desa dan arsip data dari UMKM Sekawan seperti: struktur lembaga, produk UMKM, latar belakang UMKM Sekawan dll.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah memperoleh secara lengkap data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Patton mendefinisikan teknik analisis data adalah proses merangkai urutan data dan menyusunnya menjadi unit-unit dalam pola deskripsi data, kategori, dan deskripsi data. Sementara itu, Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses menetapkan secara formal upaya untuk menemukan tema, merumuskan hipotesis atau ide

⁴⁸ Riduwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), hal 148.

berdasarkan rekomendasi, dan upaya untuk berkontribusi pada hipotesis dan tema.⁴⁹

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif, adapun data yang diperoleh peneliti yang dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif data tersebut berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis dengan memilah mana yang diperlukan untuk dipelajari lebih dalam serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁵⁰ Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman ada tiga yaitu:⁵¹

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang digunakan untuk menajamkan, mengkonsentrasikan, membuat dan mengorganisasikan data untuk menarik kesimpulan. Melalui proses reduksi data, data yang relevan disusun dan disistematisasikan ke dalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang.⁵² Mengingat data yang diperoleh peneliti selama penelitian masih sangat luas dan belum sistematis sehingga peneliti perlu untuk memfokuskan kembali dengan cara menganalisis menggunakan reduksi data. Hal ini bertujuan agar

⁴⁹ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm 89.

⁵⁰ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 178

⁵¹ Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) hal 66-68.

⁵² Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020) hal 105.

mempermudah peneliti dalam mendapatkan gambaran data yang lebih jelas sehingga peneliti bisa mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dsb. Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data yaitu teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan menentukan rencana selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan penelitian menunjukkan hasil berupa deskripsi yang sebelumnya tidak jelas, kemudian dipelajari untuk lebih jelas dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan dapat menjawab pertanyaan yang dirumuskan sejak awal, dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran tentang objek yang diteliti.

G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Teknik yang digunakan dalam menentukan

validitas data pada penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi sumber merupakan menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan beberapa data yang didapat dari informan, untuk kemudian diambil yang paling kuat.

H. Sistematika Pembahasan

Susunan pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab pokok pembahasan, antara lain:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi konsep. Dalam bab ini berisi tentang gambaran secara umum permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab kedua ini berisi tentang penelitian terdahulu serta kerangka teori yang relevan dengan tema skripsi.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan. Adapun metode penelitian tersebut terdiri dari : jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subjek, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti serta menjabarkan gambaran subyek penelitian dan pembahasan hasil temuan.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan hasil jawaban dari rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Tanggulrejo

1. Kondisi Geografis Desa Tanggulrejo

Desa Tanggulrejo merupakan desa yang berada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berbatasan dengan Kabupaten Lamongan yang terletak 15 Km di sebelah barat kota Gresik, berada 10 Km arah barat dari ibu kota Kecamatan Manyar, dan jarak Desa Tanggulrejo ke Kota Surabaya berjarak 30 km. Secara geografis Desa Tanggulrejo terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Desa Tanggulrejo Memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 184 Ha dengan batas wilayah antara lain sebelah utara desa berbatasan dengan Desa Gumeno dan Desa Morobakung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberjo, Desa Betojo Kauman dan Betojo Guci. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kramat Jati, Desa Wadak Lor dan Desa Wadak Kidul, sedangkan di bagian sebelah barat berbatasan dengan Desa Dukuh Tunggal, Desa Bapuh Bandung, dan Dearah Kecamatan Glagah Lamongan.⁵³

Desa ini terbagi dalam tiga dusun yaitu Tanggulrejo Utara, Tanggulrejo Sawah dan Tanggulrejo Dagang yang masing-masing wilayahnya di pimpin oleh kepala dusun. Keadaan tanah di desa ini berupa dataran rendah, dan termasuk dalam daerah yang gersang dan

⁵³ <https://tanggulrejo.com/data-desa/geografis> Diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 9.47 WIB.

tandus sehingga ketika musim kemarau tiba kondisi tanah di desa ini menjadi pecah-pecah maka dari itu tanah di daerah ini tidak cocok untuk dibuat tanah pertanian. Wilayah di Desa Tanggulrejo ini dikelilingi oleh pertambakan yang cukup luas kurang lebih 321,25 hektar. Desa Tanggulrejo merupakan desa yang menjadi jalur aliran sungai Bengawan Solo yang memotong 6,6 kilometer menjadi sungai-sungai kecil. Adapun pusat kantor pemerintahan desa berada di dusun Tanggulrejo Utara sehingga warga dusun Tanggulrejo Sawah dan Tanggulrejo Dagang menempuh jarak yang sedikit lebih jauh dibandingkan dengan warga dusun Tanggulrejo Utara. Potensi Desa Tanggulrejo terletak pada sektor perikanan, karena sebagian besar dari wilayah desa tersebut merupakan area tambak dengan hasil perikanan berupa bandeng, nila dan udang vaname.

2. Kondisi Demografis Desa Tanggulrejo

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa pada tahun 2021, Desa Tanggulrejo mempunyai kepadatan penduduk 2685 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 724 kepala keluarga, adapun distribusi jumlah penduduk dan rumah tangga pada setiap dusun bisa dilihat dari tabel berikut:⁵⁴

Tabel 2 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga di Setiap Dusun di Desa Tanggulrejo

No.	Dusun	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga
1.	Tanggulrejo Utara	1035	304

⁵⁴ <https://tanggulrejo.com/data-desa/kependudukan> Diakses pada 24 Oktober 2022 pukul 17.18.

2.	Tanggulrejo Selatan	854	236
3.	Dagangrejo	796	184
Jumlah		2685	724

Sumber: Data administrasi pemerintah Desa Tanggulrejo tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa Tanggulrejo sebanyak 2685 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 724 kepala keluarga. Jumlah penduduk terbanyak ada di Dusun Tanggulrejo Utara dengan jumlah 1035 jiwa sedangkan rumah tangganya sebanyak 304 kepala keluarga. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Dusun Dagangrejo dengan jumlah 796 jiwa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3 Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Penduduk Desa Tanggulrejo

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	131	122	253
2	05-09	91	65	156
3	10-14	108	97	205
4	15-19	90	100	190
5	20-24	124	106	230
6	25-29	115	119	234
7	30-34	129	107	236
8	35-39	121	112	233
9	40-44	101	98	199
10	45-49	102	81	183
11	50-54	67	73	140

12	55-59	52	49	101
13	60-64	51	63	114
14	65-69	43	44	87
15	70-74	35	42	77
16	75+	20	27	47
Jumlah		1380	1305	2685

Sumber : Data administrasi pemerintah Desa Tanggulrejo tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Tanggulrejo yang sesuai dengan kelompok umur dan jenis kelamin berjumlah 2685 jiwa. Jumlah usia produktif masyarakat sebanyak 1.505 jiwa. Usia produktif merupakan dimana usia seseorang bisa dikatakan mampu untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu. Pada usia produktif ini dapat diukur dari rentang usian 15-64 tahun. Usia 0-14 termasuk dalam golongan seseorang yang masih belum bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan penduduk lanjut usia di Desa Tanggulrejo yang berusia 65 tahun keatas berjumlah 211 jiwa, pada usia ini tingkat produktifitas seseorang menurun dikarenakan faktor usia yang rentan terhadap penyakit atau kesehatan yang menurun sehingga untuk melakukan aktifitas ataupun pekerjaan sudah tidak sanggup lagi.

Berdasarkan data monografi Desa Tanggulrejo, maka dapat diklasifikasikan pendidikan masyarakat. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanggulrejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanggulrejo

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	461

2	Taman Kanak-Kanak	253
3	SD/Sederajat	357
4	SMP/Sederajat	438
5	SMA/Sederajat	923
6	Strata 1	167
7	Strata 2	30
8	Diploma	56
Jumlah		2685

Sumber: Data administrasi pemerintah Desa Tanggulrejo

Dari tabel diatas mayoritas penduduk Desa Tanggulrejo telah menyelesaikan wajib belajar selama sembilan tahun SD dan SMP hingga jenjang pendidikan tingkat SMA. Dalam hal ini, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sangat tinggi berbeda dengan jaman dahulu yang rata-rata hanya lulusan sekolah dasar. Adapun fasilitas pendidikan di Desa Tanggulrejo dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5 Fasilitas Pendidikan di Desa Tanggulrejo

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SPS La Tulip	1
PAUD	1
TK	2
Sekolah Dasar	3
Sekolah Menengah Pertama	1
Sekolah Menengah Atas	1

Sumber : Data Administrasi Pemerintah Desa Tanggulrejo Tahun 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan di Desa Tanggulrejo sudah tersedia mulai dari pra pendidikan dasar hingga

menengah ke atas. Selain itu, masyarakat Desa Tanggulrejo juga mengedepankan pendidikan keagamaan hal tersebut dapat dilihat banyaknya santri yang mengaji di TPQ setempat. Terdapat 5 TPQ yang tersebar di masing-masing dusun. Selain fasilitas pendidikan di Desa Tanggulrejo juga terdapat fasilitas ibadah yang terdiri dari 5 Musholla dan 4 Masjid besar yang tersebar di tiga dusun.

Pada bidang ekonomi masyarakat Desa Tanggulrejo mempunyai mata pencaharian sebagai petani tambak luas tanah tambak di desa ini sekitar 164,00 Hektar. Maka dari itu, klasifikasi pekerjaan masyarakat desa Tanggulrejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Klasifikasi Pekerjaan Masyarakat Desa Tanggulrejo

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pemerintahan	110
2.	Swasta	286
3.	Wiraswasta	397
4.	Petani Tambak	686
5.	Lainnya	55

Sumber : Data Administrasi Pemerintah Desa Tanggulrejo Tahun 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa klasifikasi pekerjaan penduduk Desa Tanggulrejo paling banyak pada sektor petani tambak yang berjumlah 686 orang, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Tanggulrejo bekerja pada sektor pertanian, yakni sebagai pemilik tambak dan penggarap tambak.

3. Latar Belakang UMKM Desa Tanggulrejo

Keberadaan UMKM di Desa Tanggulrejo muncul pada beberapa tahun terakhir, dimana anggota dari pelaku UMKM ini didominasi oleh kaum perempuan yang mempunyai usaha kecil. Kondisi tersebut dilakukan berdasarkan beberapa inisiatif dari pelaku UMKM diantaranya yaitu : membantu suami supaya dapur terus mengepul, biaya perekonomian yang tidak menentu serta sulitnya mencari pekerjaan sehingga mereka berinisiatif untuk mendirikan usaha kecil-kecilan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Adapun anggota pelaku UMKM Desa Tanggulrejo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Anggota UMKM di Desa Tanggulrejo

No.	Nama	Toko	Jenis	Produk
1.	Titin	Mahardika	Makanan	Arumanis & Madumongso
2.	Yasmin	Yasmin Cake	Makanan	Cake
3.	Nikmah	Berkah Kylaish	Makanan & Skincare	Tepung serba guna & minyak wangi

4.	Famirah	Famirah	Makanan	Roti Kacang
5.	Faiq	Martabak Senja Rasa	Makanan	Martabak & Terang Bulan
6.	Nahdliyatul	Nikiprinting	Kerajinan	Souvenir & Undangan Digital
7.	Istilah	MJ Crispy	Makanan	Baby Mujair Crispy
8.	Rosyidah	Kerupuk Diva	Makanan	Kerupuk
9.	Maimun	Pentol Amo	Makanan	Pentol
10.	Toyyibah	Putri	Makanan	Cake dan Nasi
11.	Umu Kholidah	Mie Geprek Ndeso	Makanan	Mie Geprek dan Jajanan Pasar
12.	Khalimah	Otak-Otak Bandeng	Makanan	Otak-Otak Bandeng

Sumber : Arsip data UMKM Desa Tanggulsejo tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pelaku UMKM di desa ini menjual beberapa olahan makanan beberapa pelaku UMKM memanfaatkan hasil perikanan dengan mengkreasikan menjadi olahan makanan seperti otak-otak bandeng, baby mujair crispy dll. Seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih, mobilitas tinggi dan daya saing dalam bidang usaha juga semakin ketat maka perlu juga pembekalan mengenai ilmu-ilmu tentang pengelolaan usaha yang baik serta bagaimana cara meningkatkan omset penjualan hal ini bertujuan

agar mereka mampu meningkatkan kapasitas usaha dan juga mampu bersaing dengan pelaku usaha lain khalayak yang lebih luas.

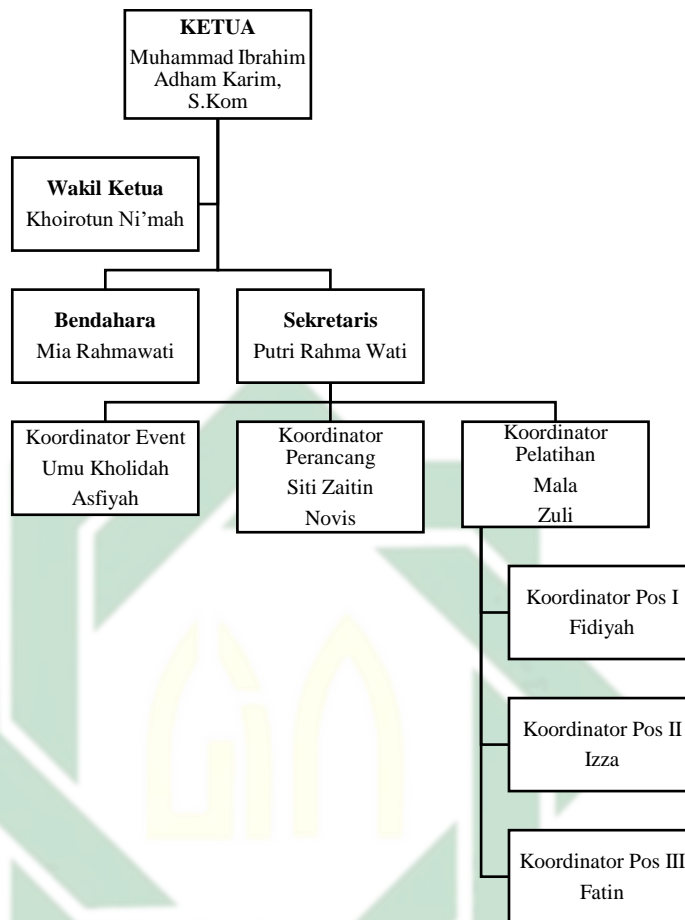
Tujuan didirikannya UMKM di Desa Tanggulrejo yaitu untuk meningkatkan pengelolaan management usaha dan kualitas daya saing masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat desa masih belum bisa menguasai teknologi dengan baik kebanyakan pelaku UMKM di Desa ini masih belum bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, adapun pemasaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM juga masih individual dan kurang baik. Maka dari itu perlu adanya pembekalan terhadap pelaku UMKM supaya bisa bersaing dengan produk-produk unggulan lainnya.

4. Susunan Kepengurusan UMKM Desa Tanggulrejo

Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi UMKM Desa Tanggulrejo menetapkan pengurus dengan rincian sebagai berikut:

Struktur Kepengurusan UMKM Desa Tanggulrejo

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



B. Peran Pemerintah Desa Tanggulrejo Dalam Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang buruk tidak hanya pada sektor kesehatan saja namun juga politik, sosial, perekonomian juga turut merasakan dampak dari pandemi ini. Salah satu sektor perekonomian yang merasakan dampak dari pandemi ini adalah UMKM, dalam hal ini UMKM menjadi penopang perekonomian di Indonesia yang mempunyai peluang besar dalam membuka lapangan pekerjaan. Namun ketika pandemi covid-19 masuk ke Indonesia pelaku UMKM mengalami penurunan omset yang signifikan hal ini terjadi dikarenakan adanya pembatasan kegiatan

masyarakat diluar rumah, kesulitan dalam memperoleh bahan baku, hingga sepiunya pembeli.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran covid-19 di Indonesia adalah dengan membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Adanya kebijakan dari pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut memberikan dampak negatif bagi sektor UMKM, pasalnya pelaku UMKM tidak bisa melakukan aktifitas jual beli secara langsung hal ini dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat di tempat umum yang berakibat pada penurunan pendapatan hal ini mengakibatkan pelaku UMKM mengalami kesulitan modal untuk membeli bahan baku.

Sektor UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) pada tahun 2018 terdapat 64,2 juta pelaku UMKM atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.⁵⁵ Namun ketika pandemi covid-19 masuk ke Indonesia

⁵⁵ Dedy Sasongko, *UMKM Bangkit Ekonomi Indonesia Terungkit*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html> Diakses pada 13 Januari 2023, pukul 18.56 WIB.

banyak dari pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan hingga lima puluh persen bahkan juga ada juga yang mengalami kebangkrutan. Pandemi covid-19 memberikan dampak negatif bagi semua sektor terutama dalam sektor perekonomian.

Sektor UMKM yang berada di desa juga turut merasakan dari penurunan omset hingga lima puluh persen. Hal tersebut dirasakan oleh pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo, sebelum adanya pandemi covid-19 kondisi UMKM di desa tersebut mengalami perkembangan yang cukup baik. Hampir setiap bulannya pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo mendapatkan pesanan hingga dikirim ke luar kota, akan tetapi ketika pandemi masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 sehingga mengharuskan semua kegiatan yang menyebabkan kerumunan ditiadakan hal ini bertujuan untuk menekan angka penyebaran covid-19 di Indonesia. Dalam menangani masalah UMKM yang mengalami penurunan omset pada masa pandemi covid-19 peran pemerintah desa dalam hal ini tidak bisa diabaikan, pasalnya pemerintah desa sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat mempunyai peranan penting untuk bisa membangkitkan dan mengembangkan lagi UMKM yang mengalami keterpurukan pada saat pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian, selama masa pandemi covid-19 rata-rata pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo mengalami penurunan omset hingga lima puluh persen. Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi penurunan pendapatan ini adalah keterbatasan pelayanan

terhadap pembeli, proses jual beli yang dilakukan oleh pelaku UMKM kebanyakan dilakukan secara langsung namun ketika pandemi covid-19 mulai masuk dan menyebar ke seluruh Indonesia ada kebiasaan baru yang dilakukan oleh konsumen yaitu dengan melakukan pembelian secara online. Selain itu, adanya pemberlakuan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak yang negatif bagi pelaku UMKM di Desa Tanggulangrejo, seperti yang dirasakan oleh Pak Maimun pedagang pentol keliling sebagai berikut:

“Iya mbak pas covid kemarin pemasukan saya turun separuh, biasanya saya jualan keliling ke beberapa desa nah pas awal pandemi kemarin itu ada beberapa desa yang di tutup gak boleh masuk jadi ya saya jualannya di sekitar desa (Desa Tanggulangrejo) ini saja kalau diperbolehkan masuk ya harus ada pakai syarat ini dan itu. Sebelum covid itu sebulan omset saya sekitar 9 hingga 11 juta mbak tapi pas covid ini omset saya menurun hingga lima puluh persen. Biasanya saya jualan itu di sekolah-sekolah atau TPQ terus malamnya baru keliling nah pas pandemi ini kan sekolah sama ngaji dialihkan menjadi daring jadi ya saya gak bisa jualan ke sekolah dan TPQ lagi.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pandemi covid-19 ini memberikan dampak yang begitu besar bagi pelaku UMKM, pada sektor UMKM ini dianggap sebagai sektor yang paling rentan terhadap pandemi ini karena pada umumnya UMKM memperoleh pendapatan dari hasil penjualan yang dilakukan sehari-hari. Adanya imbauan dari pemerintah tentang *social distancing*, pembelajaran yang dialihkan secara daring dan beberapa desa yang menerapkan *lockdown* sehingga daya beli masyarakat menjadi menurun. Hal ini juga turut dirasakan oleh Ibu

⁵⁶ Wawancara, Pak Maimun, 9 September 2022 pukul 09.56 WIB.

Thoyyibah yang juga turut merasakan dampak dari pandemi ini. Seperti yang dikatakan sebagai berikut:

“Ya pas pandemi kemarin banyak sekali ya mbak dampaknya gak ada acara gak ada kemantenan gak boleh kerumunan, kalau ditanya omsetnya menurun ya pasti saya selama pandemi kemarin itu gak ada yang pesan roti jadi bisa dibilang penurunan pendapatannya sekitar 75 persen. Biasanya saya dapat pesanan itu kebanyakan dari acara sekolah, hajatan, dan acara khotmil Qur'an di TPQ tapi selama covid kemarin kan gak ada acara ya mbak kerumunan juga gak boleh jadi ya roti saya gak jalan. Sebelum pandemi ya Alhamdulillah hampir tiap hari saya ada pesanan, na pas pandemi ini kan rotinya sepi ya mbak jadi saya beralih ke jualan nasi, rotinya tetap berjalan kalau ada pesanan ya saya buat tapi pada akhirnya eeh bagaimana saya bisa bertahan di kuliner jadi jualan nasi.”⁵⁷

Hal serupa juga turut dirasakan oleh Ibu Rasyidah selaku pelaku UMKM di bidang makanan yang memproduksi kerupuk:

“Saya jualan kerupuk ini sekitar tahun 2019 an sebelum pandemi mbak berjalan setahun jualan kerupuk ada pandemi. Pas awal-awal covid itu ya gak ada orang beli sama sekali biasanya hampir tiap bulan itu ada pesanan kerupuk 150 sampai 200 bungkus, na pas covid kemarin itu ya gak ada yang beli kan gak ada kegiatan juga ya hajatan, kemantenan kegiatan yang lain juga gak ada kan selama covid kemarin. Biasanya kan saya jual kerupuk itu perbungkusnya Rp 3.000 na dari pada gak ada pemasukan sama sekali jadi saya inisiatif untuk menjualnya dengan kemasan seribuan saya titipkan ke warung-warung teruskan di sini sekolahnya sempat offline tapi masuknya bergilir jadi saya suruh bawa anak saya ke sekolahnya untuk dijual lagi. Hampir setahun mbak gak ada yang beli kerupuk hajatan juga rame baru-baru ini saja kan 2021 juga masih pandemi apalagi di pertengahan tahun kan ada gelombang dua jadi ya masih sepi mulai rame lagi ada pesanan itu awal tahun 2022 sudah mulai ada yang pesan sampai kirim ke daerah Lamongan juga.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa pelaku UMKM selama pandemi covid-19 mengalami penurunan omset yang

⁵⁷ Wawancara, Ibu Thoyyibah, 30 September 2022 pukul 09.48.

⁵⁸ Wawancara Ibu Rosyidah, 4 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB.

signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan mengenai PSBB serta berkurangnya aktifitas masyarakat diluar rumah sehingga membuat pelaku UMKM kehilangan para konsumennya. Di tengah perkembangan UMKM yang menjanjikan, pelaku UMKM pada awal tahun 2020 harus berusaha dengan keras lagi agar bisa bertahan hidup ditengah kondisi perekonomian yang tidak stabil. Dalam menghadapi kondisi pada awal pandemi covid-19, pelaku UMKM harus mampu berinovasi untuk bisa mempertahankan usahanya ditengah kondisi perekonomian yang tidak stabil. Gagasan atau ide-ide usaha baru diharapkan mampu memberikan jalan keluar bagi mereka dari ancaman kebangkrutan. Berdasarkan berita resmi statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 November 2020, perekonomian Indonesia menyusut sebesar -5,32 persen pada kuartal II tahun 2020 dan kuartal III tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar -3,49 persen. Hal ini membuat Indonesia dalam kondisi resesi.⁵⁹

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, tidak semua pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo mengalami penurunan omset ada juga beberapa dari mereka yang omset penjualannya masih stabil bahkan juga ada yang mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan mereka melakukan penyesuaian diri dalam menjual produk tersebut selain itu strategi pemasaran yang dilakukan juga turut mempengaruhi dalam penjualan.

⁵⁹ Aini Zahra Amini, dan Djoko Andreas Navalino. *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Kota Bogor*, Jurnal Ekonomi Pertahanan, Vol. 7, Nomor 2, Tahun 2021, hal. 237.

Seperti yang dilakukan oleh Bu Izza selaku pelaku UMKM yang menjual makanan :

“Saya jualan donat mbak Alhamdulillah pas covid kemarin orderan saya semakin banyak, saya jualan itu sekitar tahun 2019 akhir kalau gak 2020 awal. Na pas covid kemarin kan semua sekolah dari rumah di situ mulai muncul ide untuk bikin masakan-masakan jadi ada kesempatan saya ngajari anak di rumah sama bikin makanan. Permintaan juga lebih banyak saya jualnya lewat online saya posting di story WhataApp dan di facebook. Kalau dibandingkan orderan sebelum dan pas covid ya banyak orderan pas covid mbak, karena kan orang-orang gak keluar rumah terus anak-anak sekolah juga belajar dari rumah jadi banyak ibu-ibu yang membelikan makanan buat anaknya.”⁶⁰

Hal serupa juga dirasakan oleh Ibu Umu Kholidah yang merupakan anggota UMKM di Desa Tanggulrejo yang menjual mie geprek dan jajanan pasar, sebagai berikut:

“Pas Covid kemarin omset penjualannya Alhamdulillah cukup stabil, saya jualan mie ayam geprek mbak mie nya saya buat sendiri jadi kalau mie nya selalu fresh. Selain jualan mie saya juga jualan makanan lain seperti gorengan, kue basah tapi kalau kue basah buatnya pas ada pesanan saja atau pas bulan puasa. Ya Alhamdulillah mbak ada aja orderan bahkan sampai ke desa sebelah itu beli mie ayam geprek saya. Saya jualannya di depan rumah kadang ya saya psoting di WhatsApp atau di facebook.”⁶¹

Pada umumnya penjualan secara langsung di masa pandemi covid-19 tengah mengalami kesulitan, hal itu dikarenakan banyaknya masyarakat yang memilih untuk berdiam dirumah dan beralih dengan melakukan transaksi jual beli secara online. Pemasaran melalui media massa menjadi salah satu cara yang dilakukan UMKM untuk mempertahankan usahanya serta memperluas pemasaran. Media sosial mempunyai dampak yang besar

⁶⁰ Wawancara, Ibu Izza 4 Oktober 2022 Pukul 10.08 WIB.

⁶¹ Wawancara Ibu Umu Kholidah, 4 Oktober 2022 pukul 16.38 WIB.

dalam memajukan suatu usaha pasalnya media sosial dapat digunakan untuk melakukan komunikasi dalam bisnis, membantu pemasaran produk dan jasa, berkomunikasi dengan pelanggan dan pemasok, melengkapi merk, mengurangi biaya dan untuk penjualan online.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang fokus pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan stimulus bagi UMKM. Bantuan pemerintah berupa kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap sektor UMKM, pemberian bantuan tersebut bertujuan untuk membantu pemulihan sektor UMKM di masa pandemi supaya bisa meningkatkan stabilitas ekonomi dalam tujuan yang telah ditetapkan dengan menghindari potensi gangguan akibat situasi yang dapat menyebabkan banyak orang kehilangan mata pencaharian, dan dapat berpengaruh pada stabilitas keamanan, sosial budaya dan iklim politik. Dalam hal ini, total anggaran yang diberikan oleh pemerintah guna membantu UMKM sebanyak Rp 123,5 triliun atau 17,7 % dari total anggaran stimulus untuk biaya penanganan covid-19 nasional sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020.⁶²

Peran pemerintah desa dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM sudah seharusnya UMKM mendapatkan prioritas utama

⁶² <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/07/14/124544869217136-program-bantuan-modal-usaha-mikro> Diakses pada 10 November 2022 pukul 12.40 WIB.

karena UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia serta berperan penting dalam membuka lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, pemerintah Desa Tanggulrejo juga mempunyai peran penting dalam pengembangan UMKM di Desa Tanggulrejo dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM. Pemerintah desa mempunyai fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan adapun fungsi tersebut adalah fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa menjadi unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk bisa membangkitkan kembali UMKM yang mengalami keterpurukan.

Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang peranan penting dalam mewujudkan desa yang mandiri secara manajerial dan finansial. Covid-19 juga memberikan pengaruh yang buruk bagi perekonomian masyarakat desa. Masyarakat Desa Tanggulrejo yang bekerja sebagai pedagang merasakan dampak dari pandemi covid-19 adanya kebijakan dari pemerintah pusat mulai dari PSBB, PPKM yang menyebabkan penurunan omset hingga 50 persen, sedangkan masyarakat Desa Tanggulrejo yang bekerja sebagai buruh pabrik ada yang dirumahkan karena pabrik tempat kerja mereka mengurangi karyawannya pada saat kasus covid-19 semakin tinggi. Sedangkan bagi masyarakat Desa Tanggulrejo yang bekerja sebagai petani tidak begitu merasakan dampak dari pandemi covid-19 mereka masih

melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasanya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan melakukan pelatihan UMKM dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Abdul Karim Ali selaku Kepala Desa Tanggulrejo :

“Ya kita adakan pelatihan foto produk, pemasaran, terus apa yaa pelatihan cabut duri bandeng terus jelly art juga ada lagi tapi saya lupa mbak sama ini kita ikutkan event-event UMKM baik yang diadakan oleh kabupaten atau kecamatan. Kalau disini tidak ada sumber SDM nya ya kita mendatangkan pelatih dari luar tapi kalau pelatihnya ada dari sini ya kita mendatangkan orang itu.”⁶³

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Mas Idam selaku ketua UMKM :

“Ya kemarin dari desa diadakan pelatihan, pelatihan buat peningkatan penjualan. Pelatihan pas covid kemarin itu ada foto produk, pemasaran eeh sama apa yaa lupa mbak yang saya inget dua itu tadi sama ada beberapa yang kolaborasi sama PKK.”⁶⁴

Dari informasi diatas, pemerintah Desa Tanggulrejo juga turut memberikan pelatihan kepada pelaku usaha mikro yang tengah mengalami penurunan omset selama pandemi covid-19, pelatihan yang diadakan oleh pihak desa ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas penjualan. Peran pemerintah desa dalam mengembangkan pemasaran UMKM sangat penting, karena dalam hal penjualan diperlukan promosi untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa di daerah tersebut mempunyai UKM yang tidak kalah bagus dengan daerah lainnya, para pelaku UMKM di desa tersebut memanfaatkan hasil alam yang dikreasikan menjadi olahan makanan. Salah satu tujuan pemberdayaan yang dilakukan

⁶³ Wawancara Bapak Abdul Karim Ali, 30 September 2022 pukul 09.00 WIB.

⁶⁴ Wawancara M. Ibrahim Adham Karim, 17 September 2022 pukul 13.26 WIB.

oleh pemerintah desa yaitu untuk meningkatkan kemandirian dan pengembangan usaha yang sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 5 tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah :

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.⁶⁵

Dalam pelaksanaan pemberdaan masyarakat masih belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengembangan UMKM di Desa Tanggulsejo antara lain:

A. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor utama yang menghambat dalam proses pengembangan UMKM ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang rendah sehingga kurang mengetahui tentang proses produksi

⁶⁵ UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

yang baik dan proses pemasaran produk secara online dengan memanfaatkan media elektronik dan belum mempunyai jiwa wirausaha yang baik. Salain itu, kurangnya kreatifitas dan inovasi untuk mengembangkan produk atau usaha yang dimilikinya.

“SDM nya disini itu masih kurang ya mbak, apalagi ini kebanyakan pelaku UMKM berasal dari ibu-ibu yang kurang mengerti tentang teknologi, pemasaran dan lainnya mbak. Kalaupun ada yang mengerti tentang eeh teknologi mungkin ya satu dua orang aja.”⁶⁶

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Abdul Karim selaku kepala desa Tanggulrejo:

“Ya SDM nya disini kurang ini ya memadahi dari pelaku UMKM sendiri juga kebanyakan ibu-ibu, kalau kita mengadakan pelatihan sering manggil orang luar buat ngasih materi tapi kalau SDM nya disini ada untuk mengisi pelatihan tersebut ya kita undang orang sini.”⁶⁷

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam pengembangan sebuah desa, jika kualitas SDM semakin tinggi maka akan memberikan kontribusi bagi pembangunan desa. Untuk bisa meningkatkan kualitas SDM perlu adanya banyak pelatihan serta pembinaan khusus supaya masyarakat mendapatkan wawasan yang luas dan terbuka tentang peluang bisnis dan bisa mengembangkan lebih lanjut UKM yang ada.

B. Pemasaran

Pemasaran mempunyai peran penting dalam menentukan tingkat penjualan produk atau jasa. Jaringan usaha yang lemah serta

⁶⁶ Wawancara M. Ibrahim Adham Karim, 17 September 2022.

⁶⁷ Wawancara Bapak Abdul Karim, 30 September 2022.

kemampuan menguasai pasar akibat dari kurangnya masyarakat dalam mempromosikan usahanya menyebabkan jaringan usaha tersebut yang masih dalam lingkup kecil.⁶⁸ Dalam hal pemasaran tidak jauh dengan penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan digital marketing menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM untuk bisa memasarkan produknya ke masyarakat luar.

C. Permodalan

Keterbatasan modal yang dialami oleh pelaku UMKM menjadi salah satu penghambat mereka. Permodalan menjadi salah satu masalah yang serius pasalnya permodalan ini merupakan faktor utama untuk bisa memperluas kemampuan usahanya atau mengembangkan produk yang mampu bersaing.

D. Kendala Legalitas dan Perizinan

Banyak UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Beberapa UMKM juga kurang memiliki pengetahuan tentang aspek hukum dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus diikuti selama pemrosesan.⁶⁹

E. Kurangnya Tenaga Pendamping

Banyak UMKM tidak memiliki akses ke layanan konsultasi dan pendampingan karena kurangnya pendamping di lapangan. Oleh

⁶⁸ Muhammad Khorul Fikri, dkk. *Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi Covid-19*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hal. 90.

⁶⁹ Amelia Setyawati, *Keunggulan Bersaing dan Kinerja UMKM Tinjauan Empirik Terhadap Pengembangan Usaha*, (Malang: MNC Publishing, 2017), hal. 10.

karena itu, sangat dibutuhkan adanya lembaga pengembangan usaha untuk memfasilitasi para pelaku UMKM dan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka.⁷⁰

Pandemi covid-19 tidak hanya memberikan dampak pada pelaku UMKM di perkotaan saja namun juga pelaku UMKM di desa juga turut merasakan dampaknya. Pada awal pandemi masyarakat masih beradaptasi dengan keadaan yang dimana masyarakat diharuskan untuk selalu menjaga kesehatan selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang PSBB serta menganjurkan untuk tetap dirumah saja, hal ini mengakibatkan pelaku usaha mikro yang kehilangan para pembelinya dan berdampak pada penurunan omset. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah supaya pelaku UMKM tetap bisa mempertahankan usahanya meskipun ditengah kondisi covid-19. Salah satu bentuk perhatian dari pemerintah desa yaitu mengadakan pelatihan bagi pelaku UMKM dengan topik yang berbeda-beda hal ini disampaikan oleh Ibu Titin selaku pelaku UMKM yang menjual Aromanis dan Modumongso:

“Pas covid kemarin kan ada beberapa pelatihan dibantu cara memasarkan produk di e-commerce, terus memasarkan di online bagaimana memotret produk yang bagus iku nah terbantu juga iku aku terus juga ada pelatihan-pelatihan lain. Dulu itu pernah ada cara mengelola keuangan program ini dibuat oleh mega sebelum Idam jadi ketua. Program tiga bulan cara mengelola keuangan untuk usaha aku ikut selama tiga bulan berturut-turut jadi kita dibimbing betul dan itu juga tak terapkan.”

⁷⁰ Ibid., hal. 11.

Hal serupa juga dilakukan oleh Ibu Istilah yang juga anggota UMKM di Desa Tanggulrejo:

“Saya masuk di grup UMKM kan na itu kalau ada pelatihan dishare di grup WA pas covid kemarin banyak pelatihan tapi pas pelatihan foto produk kemarin saya gak ikut saya ikut pelatihan itu yang pemasaran terus cara mengelola keuangan itu, setelah pelatihan yang mengeleloa keuangan itu tak terapkan di usaha saya.”⁷¹

Hasil dari pelatihan tersebut juga diterapkan oleh Pak Maimun anggota UMKM di Desa Tanggulrejo yang berjualan pentol secara keliling sebagai berikut :

“Ya saya ikut pelatihan tapi kayaknya cuman sekali tok mbak pas cara pemasaran itu biasanya itu istri saya yang tak suruh ikut soalnya kan saya dagang se mbak jadi gak bisa ikut yang sering ikut pelatihan ya istri saya nanti hasil dari pelatihan itu dikasih tau ke saya. Saya juga menerapkan ini yang pelatihan pengelola uang itu jadi tiap minggu itu laporan ke ketuanya dan pasti di tanyai itu sama ketuanya”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo menerapkan hasil dari pelatihan tersebut dalam pelatihan tersebut pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai penjualan produk secara online salah satunya melalui pemasaran di e-commerce. Dalam pelatihan tersebut, pelaku UMKM menerapkan cara mengelola keuangan selama tiga bulan yang di bimbing oleh ketua dari UMKM Desa Tanggulrejo periode 2020 selain itu, adanya pelatihan tentang foto produk juga sangat membantu pelaku UMKM mereka mendapatkan pengetahuan baru bagaimana cara membuat foto produk yang baik sehingga bisa menarik daya beli para konsumen.

⁷¹ Wawancara Ibu Istilah, 2 Oktober 2022 pukul 09.19 WIB.

Selain pelatihan di tingkat desa pemerintah desa juga mendelegasikan pelaku UMKM Desa Tanggulrejo untuk mengikuti event baik ditingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan hal ini bertujuan untuk memperkenalkan produk UMKM Desa Tanggulrejo kepada masyarakat selain itu juga mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM agar lebih produktif dan berdaya saing. Berdasarkan temuan di lapangan, pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo masih belum bisa memanfaatkan pemasaran menggunakan media elektronik hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang teknologi, hal ini disampaikan oleh Mas Idam selaku ketua UMKM di Desa Tanggulrejo :

“Aku iku udah sering bilang ke pelaku UMKM media sosial iku punya dampak besar kalau kita mau promosi secara rutin opo mané pas wayahe covid kemarin orang-orang kan pada nyari makanan atau nyari barang-barang gitu lewat online entah iku tua atau yang masih muda kan pada main sosmed yo katakanlah lewat facebook lah iki kan kebanyakan orang punya FB dan biasane banyak orang jualan ndek situ. Tapi yaaa gitu orang-orang kayak gak ada inisiatif buat memasarkan lewat sosmed setau saya yang masih aktif promo cuman beberapa”

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran melalui media elektronik masih belum diterapkan dengan baik oleh pelaku UMKM selama pandemi covid-19 masyarakat mulai melakukan belanja secara online baik untuk membeli makanan atau membeli kebutuhan yang lainnya. Pada masa pandemi covid-19 masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan penggunaan digital marketing ketika penjualan offline yang dilakukan oleh pelaku UMKM mengalami penurunan akibat pandemi maka seharusnya mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berjualan

secara online melalui marketplace atau e-commerce seperti shopee, tokopedia, lazada, bukalapak dll. Menurut Munawar e-commerce merupakan proses bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang menyambungkan perusahaan, konsumen, atau publik dalam bentuk transaksi elektronik untuk bertukar/menjual jasa, barang dan informasi secara elektronik.⁷² Dalam proses penelitian di lapangan, peneliti juga memberikan informasi kepada pelaku UMKM mengenai pemasaran melalui media sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha tersebut, ketika seseorang melakukan promosi secara aktif dengan menggunakan media sosial terdapat peluang untuk menjawab pertanyaan dan memberikan umpan balik kepada konsumen hal tersebut jika dilakukan secara benar akan memberikan dampak baik bagi kualitas produk. Selain itu, peneliti juga memberikan edukasi kepada pelaku UMKM tentang cara-cara pemasaran melalui media sosial maupun e-commerce seperti shopee atau tokopedia. Hanya beberapa dari pelaku UMKM yang melakukan penjualan secara online seperti Ibu Titin yang menjual aromanisnya di melalui facebook :

“Aku ada toko onlinenya juga mbak biasanya tak upload di instagram, facebook, status whatsapp juga. Eeh selama pandemi kemarin kan saya mengalami penurunan omset juga na pas iku aku lebih sering promosi ke grup-grup facebook arumanis ini dan Alhamdulillah pas pertengahan covid new normal itu mbak arumanis saya sudah banyak dikenal orang dan ya orderan kembali lagi meskipun gak kayak biasanya, kadang sayang yang nganterkan ke Gresik, Bungah, GKB tanpa ongkir jadi saya yang menjeput bola sendiri. Saya juga punya shoppe tapi agak bingung yaa cara makek

⁷² Mohammad Aldrin A. & Siti Nur Alam , *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal 1.

nya pernah ada orderan juga dari shoppe tapi gk sebanyak yang di facebook saya juga punya tiktokshop mbak.”⁷³

Pemasaran melalui media sosial facebook juga dilakukan oleh Ibu

Izza selaku pelaku UMKM yang menjual donat dan cake :

“Iya mbak donat saya ini tak jual online juga lewat facebook kadang ya tak taruh di story WA ya Alhamdulillah mbak donatnya mbak izza banyak yang beli gak dari sini saja ada yang dari luar desa. Biasanya kalau arah ke Gresik itu sekalian diantar suami kalau berangkat kerja kalau yang beli dari Bungah, Sembayat itu saya mbak yang nganter kadang ya COD.”⁷⁴

Hal serupa juga dilakukan oleh ibu Umu Kholidah yang menjual mie gepreknya melalui facebook:

“Mie ini kan saya jual lewat facebook juga na ini biasanya kalau ada yang beli dari luar desa dianter sama anak saya kalau yang beli dari desa sini ya kadang saya yang nganterin ini kan saya jualan kue juga biasanya saya posting di story WA facebook juga kalau saya daftar shopeefood atau gojek itu kejauhan ya beda lagi kalau saya jualan di Bungah atau di Betoyo kan masih di daerah jalan besar na kalau di sini ya mahal ongkire daripada makanane.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pelaku UMKM memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produknya secara online yang bertujuan untuk mempertahankan usahanya, dari informasi narasumber tersebut pemasaran melalui e-commerce namun kebanyakan dari orderan yang masuk berasal dari facebook selain itu pelaku UMKM masih belum bisa menguasai dnegan baik pemasaran melalui shopee. Sistem pembayaran melalui *cash on delivery* (COD) dimanfaatkan oleh pelaku UMKM Desa Tanggulrejo sebagian besar dari konsumen lebih memilih menggunakan sistem COD. Penggunaan sistem pembayaran

⁷³ Wawancara Ibu Titin, 10 September 2022 pukul 19.03 WIB.

⁷⁴ Wawancara Ibu Izzah, 4 Oktober 2022.

melalui COD menjadi strategi yang baik bagi UMKM pasalnya konsumen lebih nyaman dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan sistem tersebut hal ini juga dapat mempercepat proses orderan yang dibeli oleh konsumen.⁷⁵ Dari informasi diatas pembayaran secara COD yang dilakukan oleh pelaku UMKM dengan konsumennya tidak dipungut biaya ongkos kirim, pembagian tugas untuk mengantarkan pesanan tersebut juga dilakukan oleh pelaku UMKM hal ini bertujuan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi konsumennya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Chayapa & Cheng Lu terdapat beberapa faktor yang memengaruhi seseorang dalam melakukan pembelian secara online antara lain:

1. Kenyamanan. Faktor kenyamanan menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan belanja secara online pasalnya sebagian besar masyarakat menghindari keramaian dan berdesak-desakan ketika berbelanja di pusat perbelanjaan. Maka dari itu, pilihan untuk melakukan belanja secara online menjadi alternatif baru bagi masyarakat dan lebih efektif.
2. Kelengkapan informasi. Dengan adanya teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi begitu cepat dan mudah. Hal ini ditambah dengan banyaknya platform yang menyajikan berbagai informasi, fitur rating, dan review

⁷⁵ Armiani, *E-Commerce Berbasis Cash On delivery Guna Meningkatkan Omset Penjualan Produk UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19*, Owner: Riset dan Jurnal Akutansi Volume 6 Nomor 1, Januari 2022.

untuk memberikan ulasan mengenai kualitas dan informasi suatu produk.

3. Ketersediaan produk dan jasa. Masyarakat dapat dengan cepat untuk mengetahui ketersediaan barang hanya dengan mengunjungi website tanpa harus mengunjungi toko. Selain itu, calon pembeli juga yang berlokasi jauh dari toko bisa membeli barang secara online tanpa harus datang ke toko secara langsung.
4. Efisiensi Biaya dan Waktu. Beberapa situs web membandingkan harga dari beberapa toko seklaigus, biasanya untuk menawarkan penawaran terbaik kepada calon pembeli. Perbandingan harga ini masuk akal bagi pembeli potensial, apalagi model belanja online bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa dari pelaku UMKM masih menggunakan pemasaran dari mulut ke mulut serta memanfaatkan story whatsapp sebagai tempat pemasarannya tidak semua pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo bisa menggunakan teknologi dengan baik selain itu kebanyakan anggota dari pelaku UMKM di desa ini merupakan ibu-ibu yang minim pengetahuan tentang teknologi. Adapun permasalahan lain yang peneliti temukan pada penelitian ini adalah kurang inisiatif pelaku UMKM dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa

⁷⁶ Bambang Arianto, *Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 6 No. 2 Desember 2020, hal. 238.

maupun dari pihak UMKM sendiri. Seperti yang disampaikan oleh mas

Idam selaku ketua UMKM :

“Ya gitu orang-orang kalau ada pelatihan ngumpulannya susah meskipun udah di share di grup kalau tanggal ini ada pelatihan terus juga biasanya kordinator tiap dusun juga ngabari ibu-ibu yang gak masuk di grup atau udah masuk tapi gak sempet buka grup. Pas awal-awal itu ya banyak yang datang dan mesti yang ditanyakan itu onok bantuan ta? Jadi anggapannya orang-orang kalau kita kumpul itu dikira ada bantuan padahal kita ngumpul itu ada tujuannya buat pelatihan atau sharing gimana perkembangan usahanya nah dulu rame itu ya pas ada bantuan... bantuan hibah dari kabupaten nah cuman pas iku tok setelah itu ya banyak yang ilang banyak gak aktif lagi mungkin yang aktif separuh aja kebanyakan ibu-ibu itu menghilang. Meskipun kita ngadain berbagai macam pelatihan tapi dari UMKM nya gak maksimal yaa sama aja, kita juga eeh memberikan fasilitas website desa sebagai promosi pada akhirnya yaa sama aja dari beberapa produk yang di upload hanya beberapa yang ada semangat buat ngembangin.”

Dari informasi yang disampaikan, kurangnya inisiatif dari pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan yang diadakan di desa tersebut. Tujuan diadakannya pelatihan tersebut adalah untuk bisa membangkitkan ide-ide kreatifitas dari pelaku UMKM supaya bisa mengembangkan usahanya akan tetapi pelaku UMKM beranggapan lain bahwa dalam acara tersebut ada pemberian bantuan mereka tidak mempunyai keinginan untuk menyerap ilmu dari pelatihan tersebut. Anggota dari UMKM di Desa Tanggulrejo rata-rata berasal dari ibu-ibu yang kurang memahami tentang pemasaran secara digital, dalam hal ini hanya beberapa pelaku UMKM yang masih aktif dan mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah desa juga memberikan fasilitas bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan usahanya melalui website desa yang terhubung langsung dengan nomor dari pelaku UMKM. UMKM yang berdiri sejak tahun 2019 ini mempunyai

anggota sekitar 20 orang yang tersebar di tiap dusunnya, rata-rata pelaku UMKM mempunyai usaha di bidang makanan. Seperti yang dijelaskan pada latar belakang penelitian ini, produk unggulan di desa ini adalah berupa ikan bandeng, nila dan udang vaname yang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai olahan makanan, salah satu olahan makanan tersebut yang menjadi produk unggulan di desa ini adalah MJ crispy baby fish.

Dalam hal ini, Ibu Istilah selaku pelaku UMKM yang menjual olahan makanan tersebut dengan memanfaatkan limbah baby mujair yang dapat mencemari tambak pasca panen kemudian diolah menjadi makanan yang lezat. Pemanfaatan baby mujair ini memberikan hasil yang maksimal dari budidaya perikanan sehingga tidak ada produk mentah yang terbuang dan merubah produk mentah menjadi produk yang siap konsumsi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Istilah dalam wawancara sebagai berikut:

“Biasanya ikan mujair yang kecil-kecil ini kan kebanyakan dibuang ya terus orang Tanggul sendiri juga sudah bosan kan disini juga banyak ikan na disitu saya manfaatkan buat jadi baby crispy ini. Untuk pemasarannya ini pas awal-awal itu di pondok pesantren sunan drajat kan temen saya ada yang jadi dosen disana dia awalnya mintak 50 bungkus diambil setengah bulan sekali terus minta tambah banyak 100 sampai 300 bungkus biasanya juga saya ngirim ke Jakarta, Jombang, Semarang, Bojonegoro ini tak lewatkan ekspedisi. Ini juga kemarin ada orang dinas perikanan ke sini pas saya goreng ikannya ya tak bawakan. Kalau pemasarannya itu ada di ini websitenya Tanggulrejo mbak istilah ini gak tau begituan tak serahkan ke Idam semua, pas agustus kemarin kan ada bazar di Pongangan na saya bawa banyak ya Alhamdulillah habis. Biasanya juga saya dapat pesanan dari orang dinas perikanan terus ada temen saya juga minta dikirim ke Qatar tapi tak paketkan ke Jakarta dulu nanti karyawannya yang ngirim ke sana ya banyak gak ini aja ada udang crispy, belut juga.”⁷⁷

⁷⁷ Wawancara Ibu Istilah, 2 Oktober 2022.

Dari informasi diatas, awal mula adanya ide untuk memanfaatkan limbah baby mujair tersebut dikarenakan kebanyakan masyarakat dari desa tersebut membuang ikan mujair yang kecil-kecil tidak banyak orang di Desa Tanggulrejo yang mau mengolah ikan tersebut. Pondok pesantren menjadi awal pemasaran dari produk tersebut yang kemudian menyebar ke beberapa kota hingga ke luar negeri. Dalam hal ini, Ibu Istilah hanya memasarkan produknya melalui website desa hal tersebut dikarenakan pelaku UMKM tersebut kurang bisa memahami teknologi sehingga proses pemasaran secara digital diserahkan kepada ketua UMKM. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo kurang bisa memanfaatkan media digital pemasaran menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan bagi UMKM. Sebagian besar pelaku UMKM menggunakan facebook dan WhatsApp sebagai tempat untuk memasarkan usahanya, sementara itu sebagian kecil pelaku UMKM yang mampu mengoperasikan media digital dan media sosial dinilai efektif dalam memasarkan produknya. Branding produk UMKM bisa dilakukan melalui media sosial hal ini memberikan dampak yang positif dalam perkembangan produk bagi pelaku usaha mikro, pemasaran produk secara digital dapat meningkatkan penjualan dengan memepermudah proses pemesanan dan pembelian antara penjual dan pembeli.⁷⁸ Dalam hal ini, pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo yang

⁷⁸ Zainal Abidin Achmad, dkk. *Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pemasaran Produk UMKM di Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Gresik*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 10, No. 1, April 2020. Hal 102.

memanfaatkan e-commerce hanya 3 pelaku usaha, sedangkan pelaku UMKM yang menggunakan media facebook dan WhtasApp sebagai tempat pemasaran usahanya ada 5 pelaku usaha selebihnya mereka menggunakan pemasaran dari mulut ke mulut atau dari para kenalannya saja. Selain mengadakan pelatihan serta mendelegasikan pelaku UMKM Desa Tanggulrejo dalam bazar di tingkat kabupaten maupun kecamatan pemerintah desa bekerjasama dengan karang taruna dalam mengadakan bazar UMKM di Desa Tanggulrejo, pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya kegiatan bazar tersebut selain itu masyarakat Desa Tanggulrejo juga turut meramaikan bazar UMKM tersebut.

Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memerlukan bantuan dari pemerintah daerah hal ini supaya bisa menjangkau masyarakat hingga ke penjuru negeri. Dengan ini, pemerintah pusat bukan lagi satu-satunya kekuatan untuk melaksanakan pembangunan, melihat problem yang terjadi bukanlah hanya di suatu daerah namun juga di seluruh Indonesia maka dari itu perlu adanya pihak lain dalam upaya untuk melakukan percepatan pemilihan ekonomi nasional. UMKM mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia oleh karena itu, pemerintah baik ditingkat pusat maupun desa sudah seharusnya memprioritaskan UMKM supaya bisa bangkit kembali serta bisa mengembangkan usahanya.

Pemerintah desa sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pelaku UMKM. Adapaun yang dimaksud dari pemerintah daerah

adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik mempunyai tugas dalam menjalankan desentralisasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Gresik memiliki peranan yang strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan ekonomi di Daerah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan (Diskoperindag) memberikan beberapa fasilitas kepada pelaku UMKM antara lain :

1) Fasilitas Penyaluran Bantuan

Selama pandemi covid-19 pelaku UMKM mengalami penurunan omset hingga lima puluh persen, pemerintah daerah sebagai fasilitator mempunyai peranan penting dalam mengembangkan UMKM. Dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik membantu memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan stimulus dari pemerintah.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya berupa uang saja namun ada juga bantuan yang berupa barang seperti yang disampaikan oleh pak Koes Soedarsono selaku staff Dinas Koperasi Usaha Mikro,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik:

“Bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro namanya BPUM tapi sumber dananya dari pemerintah pusat kita hanya mensosialisasikan kepada mereka untuk bisa memenuhi persyaratannya. Ada lagi yang namanya bansos itu juga dari pusat sifatnya juga untuk memberikan bantuan kepada UMKM yang terdampak covid-19 berupa uang tunai. Kalau yang bansos Rp

2.400.000 dan kalau BPUM sebesar Rp 1.200.000 mendapatkan dua kali.”⁷⁹

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Thoyyibah selaku pelaku UMKM yang memproduksi roti :

“Iya saya mendapatkan bantuan uang kalau gak salah itu 1.200.000 mbak”

Bapak Maimun juga membenarkan jika menerima bantuan yang berupa uang, seperti yang beliau nyatakan saat wawancara:

“Saya kemarin dapat bantuan sebesar Rp 1.200.000 dua kali setau saya bantuannya diperuntukkan pedagang kecil.”

Hal ini juga dirasakan oleh Ibu Titin selaku pelaku UMKM yang memproduksi makana yang berupa arumanis dan modumongso, seperti yang beliau nyatakan saat wawancara:

“Iya kemarin saya dapat bantuan BPUM dapat Rp 2.400.000 saya dapat bantuan dua kali mbak yang kedua ini saya dapat Rp 1.200.000”

Dinas Koperasi dan Perindag Kabupaten Gresik sebagai perantara penyaluran BPUM memfasilitasi pendataan pelaku usaha mikro yang nantinya akan diajukan sebagai penerima BPUM. Seperti yang disampaikan oleh pak Koes Soedarsono selaku staff Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagai berikut:

“Bantuan BPUM ini kan yang menyeleksi dari pusat jadi kita mensosialisasikan kepada mereka kemudian kita buat link google form kemudian kita sebarkan ke mereka lalu mereka yang mengisi link tersebut.”

⁷⁹ Wawancara Pak Koes Soedarsono, 3 Oktober 2022 Pukul 13.03 WIB.

Berkaitan dengan hal tersebut penyaluran pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik melakukan pendataan calon penerima BPUM secara online hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan. Informasi mengenai pengajuan bantuan bagi pelaku usaha mikro dipublikasikan melalui media sosial termasuk dalam website pemerintah Kabupaten Gresik dan mengirimkan informasi tersebut di setiap kecamatan.

Gambar 1 Poster Pengajuan BPUM



Sumber : Instagram Pemerintah Kabupaten Gresik

Adapun alur penyaluran BPUM sebagai berikut :

1. Pengusulan calon penerima
2. Pembersihan data dan validasi data calon penerima
3. Penetapan penerima

4. Pencairan dana BPUM

5. Laporan penyaluran

Dalam pemberian bantuan BPUM tidak semua pelaku UMKM mendapatkan bantuan tersebut, pasalnya salah satu syarat untuk bisa mendapatkan bantuan BPUM yaitu harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga bantuan tersebut tidak bisa dinikmati oleh semua pelaku UMKM. Dalam penelitian ini mayoritas UMKM di Desa Tanggulsejo merupakan pelaku usaha mikro yang masih belum mempunyai NIB ataupun SKU (Surat Keterangan Usaha) sehingga mereka tidak merasakan bantuan tersebut. Adapun persyaratan untuk mendapatkan bantuan BPUM sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia
2. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
3. Mempunyai usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), serta foto tempat usaha
4. Bukan termasuk ASN, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD
5. Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Proses pelaksanaan cleansing dan verifikasi sebagai tahap untuk menentukan dapat tidaknya bantuan BPUM bukanlah tugas Dinas Koperindag Kabupaten Gresik melainkan tugas dari

Kementerian Koperasi UKM RI. Dengan adanya pemberian bantuan serta fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam penyaluran BPUM diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pelaku UMKM yang terdampak covid-19.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa program bantuan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM yang terdampak covid-19 yang berupa uang tunai tersalurkan dengan baik kepada pelaku UMKM akan tetapi tidak semua pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo mendapatkan bantuan tersebut dikarenakan beberapa dari pelaku UMKM tidak mempunyai NIB atau SKU yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan BPUM.

2) Fasilitas Pelatihan Penggunaan E-Commerce dan Pemasaran

Semenjak diberlakukan PSBB serta anjuran pemerintah tentang *social distancing* dan *physical distancing* memberikan kebiasaan baru masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli yang beralih secara online. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan inspirasi dan inovasi bagi pelaku UMKM untuk mengenal *marketplace* dan *e-commerce*, hal ini disampaikan oleh pak Koes Soedarsono selaku staff Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagai berikut :

“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada mereka (pelaku UMKM) untuk mengenal IT, mengenal marketplace,

mengenal e-commerce itu kami bekerja sama dengan shopee, bekerja sama dengan tokopedia, dan bukalapak juga bekerjasama dengan diskominfo. Itu ditingkat kabupaten Gresik ya, kalau ditingkat provinsi kan ada Jatim bejo jadi ecommerce itu kan ada yang sifatnya yang mengelolah pemerintah ada juga yang mengelola swasta. Nah kalau swasta kan seperti tokopedia, shopee, lazada kalau yang di pemerintah itu mbak ada Jatim bejo sama e-catalog. Jadi kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada UMKM untuk memanfaatkan media-media yang ada, sehingga dampak daripada covid-19 ini minimal bisa teratasi ya mbak. Kan penjualan offline nya terganggu nah mereka bisa memanfaatkan dengan melakukan penjualan secara online”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pelatihan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM, pasalnya pandemi covid-19 mengubah pola belanja masyarakat yang dulunya secara langsung kini beralih secara online. Salah satu cara untuk bisa tetap bertahan serta menjangkau pelanggan lebih banyak yaitu dengan memanfaatkan pemasaran melalui *marketplace* atau *e-commerce*. *E-commerce* di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan, terlebih lagi ketika pandemi covid-19 dimana banyak konsumen yang sebelumnya tidak pernah melaksanakan belanja online kini beralih menggunakan platform digital untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) selama pandemi covid-19 pertumbuhan e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan hingga 91 persen, sementara penetrasi pengguna internet di

Indonesia juga melonjak hingga 73,7 persen.⁸⁰ Upaya Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pelatihan tersebut supaya dapat membantu pelaku usaha mikro agar tetap semangat dalam mengembangkan usahanya. Fokus dalam pelatihan ini adalah mengarahkan serta memberikan informasi kepada pelaku UMKM mengenai tata cara menjual produk di e-commerce baik di shopee, lazada, tokopedia dan juga untuk memberikan kemudahan dalam rangka verifikasi akun bagi UMKM. Selain itu, dalam pelatihan ini juga diberikan pelajaran mengenai digital marketing mengenai tata cara promosi produk yang baik seperti disampaikan oleh pak Koes Soedarsono selaku staff Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagai berikut :

“Kami mendatangkan pihak dari ecommerce untuk sosialisasi ke pelaku UMKM tujuannya untuk membantu mereka cara verifikasi akun tujuan kami mendatangkan orang ecommerce kan supaya ini mbak memudahkan pelaku UMKM dalam verifikasi soalnya yang paling susah kan pada tahap ini ya mbak. Kemudian juga ini ya diajar digital marketing bagaimana menampilkan produk yang baik, bagaimana mereka membuat apa eeh promosi produk yang baik itu dalam pelatihan seperti itu. Termasuk foto produk bagaimana foto itu bisa menarik konsumen supaya bisa di upload ke shopee, lazada, tokopedia.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Koperasi Usaha Mirko Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik mendatangkan pihak ecommerce untuk

⁸⁰Feriawan Hidayat, *Industri E-Commerce Raup Untung di Masa Pandemi* <https://www.beritasatu.com/ekonomi/727253/industri-ecommerce-raup-untung-di-masa-pandemi> Diakses pada 22 November pukul 10.06 WIB.

memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM serta membantu mereka dalam melakukan verifikasi akun. Selain itu, pengetahuan tentang digital marketing sangat diperlukan hal ini dikarenakan untuk menarik minat konsumen atau calon pembeli secara cepat.

Berdasarkan dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam memfasilitasi pelaku UMKM berupa pelatihan penjualan melalui e-commerce dengan mendatangkan pihak dari shopee, lazada, tokopedia secara langsung. Adapun materi yang diberikan pada saat pelatihan tersebut mengenai bagaimana cara melakukan verifikasi akun serta digital marketing supaya bisa menarik daya beli masyarakat.

3) Fasilitas Klinik UMKM

Klinik UMKM ini diperuntukkan kepada UMKM yang tengah mengalami masalah dalam bisnisnya. Puduk gallery di manfaatkan oleh pemerintah menjadi klinik bagi UMKM, dahulunya tempat ini dijadikan sebagai pusat UMKM dan kuliner khas Gresik yang beroperasi beberapa bulan saja kemudian adanya pandemi covid-19 yang menyerang berbagai sektor termasuk UMKM sehingga mengakibatkan puduk gallery ini tidak beroperasi lagi sekitar 1,5 tahun lebih.

Layanan konsultasi yang berada di puduk gallery ini diharapkan mampu memberikan jalan keluar bagi pelaku UMKM yang mengalami permasalahan pada bisnisnya selama pandemi

covid-19. Hal ini diungkapkan oleh pak Koes Soedarsono dalam wawancara sebagai berikut:

“Pudak gallery itu dia memberikan konsultasi bagi UMKM yang mengalami permasalahan dalam bisnisnya. Terkait masalah pemasarannya atau masalah manajemen keuangannya itu bisa melalui pudak gallery jadi kita semacam punya kayak klinik gitu istilah ibaratnya seperti rumah sakitnya UMKM. Termasuk juga rumah kurasi, kurasi itu seleksi terhadap produk yang layak jual dan layak konsumsi jadi yang di kurasi itu produknya baik dari segi kualitas ataupun dari segi legalita situ di kurasi semua. Jadi di pudak gallery itu ada rumah kurasi, ada klinik jadi kalau ada UMKM yang mengalami kendala dalam pemasaran ya bisa ke pudak gallery supaya bisa kita bantu untuk memberikan apa ya memberikan semacam akses-akses gitu ya atau semacam nasihat atau rekomendasi kepada mereka untuk apa ya untuk mengembangkan usahanya untuk membesarkan usahanya.”

Dengan dioperasikannya kembali pudak gallery diharapkan mampu memberikan solusi bagi UMKM yang tengah mengalami kesulitan. Adanya campur tangan pemerintah dalam memberikan fasilitas bagi UMKM yang tengah mengalami keterpurukan selama pandemi sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai tujuan untuk pemulihan kembali ekonomi di masa pandemi covid-19, maka dari itu dengan dimulainya aktifitas di pudak gallery diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan produk unggulan lainnya serta diharapkan dapat menembus pasar internasional.

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pemerintah daerah untuk mengelola dampak pandemi covid-19

terhadap UMKM khususnya pada usaha mikro di Kabupaten Gresik, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Koes Soedarsono selaku staff Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik:

“Pemerintah itu fungsinya sebagai regulator menciptakan peraturan-peraturan, dinas itu kan punya peraturan sendiri ada regulasinya juga jadi tetep yang kita pakai itu ya peraturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, turun lagi peraturan menteri, turun lagi peraturan gubernur, peraturan daerah dan peraturan bupati.”⁸¹

Dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik menjalankan fungsinya sebagai regulator berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman umum penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik menjadikan peraturan menteri tersebut sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pengusul usaha mikro yang

⁸¹ Wawancara Pak Koes Soedarsono, 3 Oktober 2022.

memperoleh BPUM. Dengan ini telah diimplementasikan penyaluran bantuan BPUM melalui pendataan secara online yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik bagi pelaku UMKM yang mengajukan diri sebagai penerima BPUM.

Kedua, berdasarkan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2020 yang berisi tentang jaring pengamanan sosial, stimulus ekonomi, dan bantuan langsung tunai desa penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) Kabupaten Gresik. Dalam hal ini dinas terkait menjadikan perbup ini juga dijadikan sebagai dasar untuk memberikan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang berada di Kabupaten Gresik. Dalam menjalankan fungsi regulator ini terbagi menjadi dua wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedua mempunyai kekuasaan sendiri dalam mengatur masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan sebagai aktor yang mempercepat pengembangan usaha mikro selama pandemi covid-19 dengan memberikan bantuan modal yang berupa dana hibah pemberian dana hibah ini berasal dari APBD Kabupaten Gresik. Pemberian dana hibah ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, tujuan diberikannya dana hibah tersebut

diharapkan mampu membantu permodalan bagi pelaku usaha mikro supaya bisa tetap mempertahankan usahanya selama pandemi covid-19.

Dalam hal ini bantuan dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Gresik berupa barang. Seperti yang disampaikan pak Koes Soedarsono :

“Dana hibah dari kabupaten tapi dalam bentuk barang jadi pelaku UMKM bisa mengajukan kebutuhannya sesuai dengan usahanya masing-masing nanti setelah dia mengajukan proposal itu maka kita akan survei ke lokasi tersebut. Lah kalau APBD ini bukan berupa uang tapi berupa barang misalnya saya pengusaha apa eeh kerupuk maka mengajukan kebutuhannya apa kompor gas elpiji wajan sutila seperti itu kalau yang jual pentol ya mengajukan ini apa alat eeh apa alat untuk pembuat pentol itu pokoknya sesuai dengan usahanya.”

Dari informasi tersebut, dapat dilihat bahwa pemberian dana hibah kepada pelaku UMKM berupa barang yang sesuai dengan kebutuhan usahanya masing-masing langkah selanjutnya yaitu dengan mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan tersebut yang kemudian dilakukan survei oleh pihak dinas kepada pelaku usaha mikro yang telah mengajukan bantuan tersebut hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dari isi proposal tersebut.

Dalam hal ini, pelaku UMKM yang berada di Desa Tanggulrejo mengajukan bantuan dana hibah berupa kebutuhan usaha belum mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh ibu Umu yang merupakan salah satu pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo sebagai berikut :

“Sudah mengajukan saya di UMKM tapi gak tau katanya 2022 turun berupa barang saya kan ngajukan ini gilingan mie kalau saya

dapat gilingan mie ya saya teruskan nah kalau saya menggunakan gilingan mie manual ya gak bisa saya sudah punya gilingan mie yang manual terus saya mengajukan yang mesin cup-cup listrik iku lo na iku kan saya bisa jual tiap hari tapi ya gak ada apa-apa sampek sekarang. Kalau saya pakai gilingan manual tiap hari kan lama-lama rusak mbak tenaganya juga ke kuras kalau pakai gilingan yang mesin kan enak. Saya mengajukannya sudah lama sekitar 2 tahunan kan saya masuk grup UMKM desa na itu kayak di ini kayak di koordinir gitu lo siapa saja yang mau mengajukan kayaknya ada beberapa orang ya ikut mengajukan bantuan berupa barang itu ada yang mengajukan oven, terus eeh kayak alat buat jamu gak tau apa pokoknya buat minuman terus alat untuk peniris minyak tapi gak ada yang turun.”⁸²

Dari informasi diatas, beberapa dari pelaku UMKM mengajukan kebutuhan usaha seperti alat penggiling mie yang menggunakan tenaga listrik, oven roti, spinner peniris minyak namun tidak ada yang mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini membuat pelaku usaha mikro tidak bisa mengembangkan usahanya, adanya bantuan berupa barang ini sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya tujuan pemberian bantuan permodalan dan pendanaan yaitu untuk mengubah usaha bisnis menjadi lebih produktif dan kompetitif.⁸³

Peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan permodalan para pelaku UMKM tentunya tidak sebatas memberikan informasi. Peran pemerintah sebagai katalisator lebih diarahkan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang isu-isu yang menjadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal

⁸² Wawancara Ibu Umu Kholidah, 4 Oktober 2022.

⁸³ Devi Chandra Nirwana dkk, *Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3 No. 1, 2017. Hal, 8.

ini, peran pemerintah daerah yakni Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah melaksanakan perannya sebagai katalisator dalam meningkatkan permodalan melalui dana hibah APBD meskipun mengalami keterbatasan pada anggaran sehingga mengakibatkan pelaku UMKM ada yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Peran yang dilakukan oleh dinas koperasi dan UKM Kabupaten Gresik ini sesuai dengan teori Gede Diva sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan UKM.

Fokus peranan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan ini terletak pada kegiatan yang mampu membantu para pelaku usaha mikro tersebut bangkit di masa pandemi serta dapat mengembangkan usahanya kembali dengan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 2.400.000.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Tanggulrejo telah melakukan beberapa upaya untuk bisa membangkitkan serta mengembangkan UMKM di desa tersebut. Hal ini sejalan dengan sistem yang disebut AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, sistem tersebut harus berkesinambungan sehingga dapat menjalankan struktur dan fungsinya sesuai dengan tindakan, memenuhi kebutuhan dan mencapai kebutuhan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Tanggulrejo dalam mengembangkan UMKM di masa pandemi covid-19 harus mengedepankan program

kegiatan untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini terdapat empat persyaratan mutlak untuk mencapai suatu kebutuhan, yaitu :

Adaptation, pemerintah desa harus bisa untuk beradaptasi dengan kondisi covid-19, adaptasi dilakukan untuk mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM pada masa pandemi covid-19 disisi lain pelaku UMKM juga harus bisa beradaptasi dengan keadaan covid-19 dimana masyarakat mulai beralih dari pembelian secara offline ke pembelian secara online sehingga harus ada inovasi untuk bisa mempertahankan usahanya di masa pandmei covid-19. Dalam hal ini, pemerintah Desa Tanggulsejo menangani permasalahan yang terjadi pada pelaku UMKM yang berdampak pada menurunnya pendapatan bagi pelaku UMKM selama pandemi covid-19, sehingga pemerintah desa memberikan beberapa pelatihan untuk meningkatkan penjualan, membantu dalam proses pendaftaran BPUM, mengadakan kegiatan bazar UMKM, menyediakan website desa sebagai tempat promosi produk UMKM Desa Tanggulsejo.

Goal Attainment, Pemerintah Desa Tanggulsejo mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk bisa membangkitkan serta mengembangkan lagi UMKM yang mengalami keterpurukan akibat pandemi covid-19. Maka dari itu, pemerintah desa harus aktif dalam mengadakan pelatihan bagi UMKM selain itu pelaku UMKM juga diharapkan turut berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan yang

diadakan oleh pemerintah desa maupun pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM di Desa Tanggulrejo yaitu dengan mengikutsertakan dalam bazar baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten.

Integration, Pemerintah desa harus bisa mengintegrasikan antara pelaku UMKM dengan program kegiatan untuk mempertahankan hubungan sebagai satu sistem dengan membantu memperbaiki kelemahan pada UKM. Dengan diadakannya rapat setiap minggu sekali untuk membahas inovasi produk, peningkatan kinerja dan sebagainya sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab bersama untuk pengembangan UMKM.

Latency, suatu sistem dapat berfungsi sesuai dengan fungsi strukturalnya merupakan tugas bersama untuk menjaga dan memelihara pola-pola yang sudah berjalan. Dalam hal ini, pola pada pemerintah Desa Tanggulrejo dan pelaku UMKM tidak terjadi dengan baik secara fungsi strukturalnya sehingga sistem kegiatan tidak berjalan sesuai dengan peran dan fungsi serta target yang diinginkan belum mencapai hasil yang maksimal hal ini dikarenakan kurangnya antusias dari pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa selain itu kurang adanya inovasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya. Maka dari itu, perlu dibangunnya suatu sistem struktural dan fungsional untuk

meningkatkan inovasi serta ketertarikan pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat dipahami bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam hal ini peran pemerintah desa dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang telah dijalankan untuk mengembangkan UMKM di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan pemasaran, foto produk, pengelolaan keuangan, pemberian fasilitas yang berupa webiste desa yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM dalam mempromosikan usahanya, selain itu pemerintah desa juga mengikutsertakan UMKM Desa Tanggulrejo dalam bazar di tingkat kecamatan maupun kabupaten, pemeirntah desa telah menjalankan perannya untuk memfasilitasi dalam pengembangan UMKM yang tengah mengalami dampak dari pandemi covid-19.

Hal ini sejalan dengan teori *governance*, dapat dilihat bahwa terdapat relasi antara pemerintah dengan masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM. Pemerintah desa sebagai alat kekuasaan negara berada di garis depan dalam melayani kepentingan masyarakat dan mencapai cita-cita nasional serta harus mampu menerjemahkan tatanan pemerintahan yang baik ke dalam khususnya dalam pengembangan UMKM. Relasi yang terjalin antara pemerintah desa

dengan masyarakat dalam hal ini adalah pelaku UMKM memberikan ruang untuk bisa mengembangkan usahanya pada masa pandemi covid-19. Meskipun pemerintah desa telah memberikan ruang bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya tetapi belum semua pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa, hal ini dikarenakan pelaku UMKM yang masih belum bisa memanfaatkan teknologi yang baik dan kurangnya antusias dari pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Meskipun pemerintah desa sudah melakukan upaya untuk bisa mengembangkan UMKM yang mengalami kesulitan, namun adanya perubahan lingkungan, ketersediaan sumberdaya dan kebutuhan yang berubah membutuhkan penyesuaian terus menerus terhadap pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo, sehingga dukungan dari pemerintah daerah tetap diperlukan. Dalam hal pemasaran dan pelatihan-pelatihan untuk inovasi dalam mengembangkan usahanya, beberapa dari pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo ikut serta dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik. Melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik pelaku UMKM juga mendapatkan pelatihan-pelatihan yang bekerja sama dengan pihak e-commerce seperti shopee, tokopedia, lazada dan Diskominfo Kabupaten Gresik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

Pemerintah Desa Tanggulrejo mempunyai peran penting dalam mengembangkan UMKM yang terdampak pandemi covid-19 dengan memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan, foto produk, pengelolaan keuangan dll. Selain itu, pemerintah Desa Tanggulrejo juga menyediakan fasilitas yang berupa website desa bagi pelaku UMKM dengan berisikan kontak dari pelaku UMKM sehingga jika ada pembeli yang berminat maka bisa menghubungi kontak dari pelaku UMKM secara langsung.

Dalam mengembangkan UMKM yang terdampak pandemi covid-19, pemerintah desa Tanggulrejo juga perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan pemasaran dan pelatihan-pelatihan untuk inovasi dalam mengembangkan usahanya yang lebih intens. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa masih pasif sehingga perlu bantuan dari pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan UMKM. Pemerintah desa telah memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, namun hal tersebut masih belum dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan pelaksanaan pelatihan tersebut belum memberikan hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya antusias dari pelaku UMKM untuk mengikuti program tersebut selain itu mayoritas pelaku UMKM di Desa Tanggulrejo adalah ibu-ibu yang kurang mengetahui tentang teknologi dan wawasan tentang wirausaha sehingga mereka belum bisa menerapkan hasil dari pelatihan tersebut pada usahanya.

B. SARAN

Berkaitan dengan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Tanggulrejo, diharapkan bisa meningkatkan kembali kualitas SDM yang ada di Desa Tanggulrejo untuk berpikir mandiri serta meningkatkan skill untuk bisa mengembangkan usahanya. Selain itu, pemerintah desa diharapkan lebih pro aktif dalam memperhatikan pelaku UMKM yang kurang mengerti tentang kewirausahaan dengan terus memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan kepada pelaku usaha. Meningkatkan jaringan komunikasi dengan pelaku UMKM sehingga mudah dipantau dan keterampilan UMKM akan semakin meningkat.
2. Bagi pelaku UMKM, diharapkan tetap fokus dalam menjalankan usahanya dan senantiasa berusaha untuk mengembangkan usahanya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa atau lembaga lainnya. Selain itu, sesama anggota UMKM diharapkan dapat merangkul serta memberikan dukungan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Aisyah, Siti. *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Serta Strategi E-Marketing UMKM Di Indonesia*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Aldrin, Mohammad and Siti Nur Alam. *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. Medan: Kita Menulis, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Basrowi and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Djamhari, Eka Afrina , et al. *Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan (Persepsi dan Partisipasi Masyarakat)*. Jakarta: PRAKARSA, 2022.
- Fikri, Muhammad Khoirul, Hendri Hermawan Adinugraha and Sri Mulyono. *Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi Covid-19*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Hardani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Lenny, Elisabeth Marit, et al. *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*. Medan: Kita Menulis, 2021.
- Mawardani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mustofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Nurdin, Ismail and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nursaripa, Harahap. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.

- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Riduwan. *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Rosidi, Abidarin and Rinatania Anggraeni Fajriani. *Reiventing Local Gomerment, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2013.
- Setyawati, Amelia. *Keunggulan Bersaing dan Kinerja UMKM Tinjauan Empirik Terhadap Pengembangan Usaha*. Malang: MNC Publishing, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta, 2008.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Umrati and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Wekke, Ismail Suardi, dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

JURNAL

- Amini, Zahra Aini and Djoko Andreas Navalino. "Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Kota Bogor,." *Jurnal Ekonomi Pertahanan* Vol. 7, No. 2 (2021): 237.
- Arianto, Bambang. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Dunia,." *Jurnal Ekonomi Perjuangan* Vol. 2, No. 2 (2020): 108.
- Arianto, Bambang. "Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19,." *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 6, No. 2 (2020): 23.
- Armiani. "E-Commerce Berbasis Cash On delivery Guna Meningkatkan Omset Penjualan Produk UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19,." *Owner: Riset dan Jurnal Akutansi* Vol. 6, No. 1 (2022): 673.

- Hernikawati, Dewi. "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap jumlah Kunjungan Pada Situs E-commerce Di Indonesia Menggunakan Uji T Berpasangan." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* (2021): 193.
- Labolo, Muhadam. "Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti* Vol. 7, No. 2 (2017): 76.
- Lay, Cornelis and Wawan Masudi. "Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 9 No. 2 (2005): 227.
- Lumempow , Karla Meiva, Sarah Sambiran and Ismail Rachman. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa." *Jurnal Governance* Vol.1, No. 1, (2021): 2-3.
- Natasya, Vina and Pancawati Hardiningsih. "Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi." *Journal of Economics and Business* Vol. 5 No. 1 (2021): 142.
- Nirwana, Devi Chandra, Muhammadiah Muhammadiah and Muhajirah Hasanuddin. "Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 3, No. 1 (2017): 8.
- Samudro, Eko G. "Pemerintah Indonesia Menghadapi Benana Nasional Covid-19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional." *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 26, No. 2 (2020): 135.
- Syamsurizaldi, et al. "Model Community Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 12, No. 1 (2021): 36.
- Tumija. "Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Cipageran, Cimahi." *Journal of Community Service and Empowerment* Vol. 1 No. 2 (2022): 105.
- Zainal Abidin Achmad, Thareq Zendo Azhari, dkk. "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pemasaran Produk UMKM Di Kelurahan Sidokumpul Kabupaten Gresik." *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 10, No. 1 (2020): 102.

SKRIPSI

- Auliya, Alfa Nur, 2021. *Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Ningsih, Utami Maulidya, 2020. *Peran Pemerintah Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah*. Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.

Prastika, Hamami Cahya, 2017. *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magelang*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Sumber Lain

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)* BAB 1 Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah* BAB 1 Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa* Pasal 1 Ayat 12

UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Arfah, Hamzah. *Upaya Pemkab Gresik Menekan Kasus Covid-19 Selama 2 Pekan*, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/10/18363851/upaya-pemkab-gresik-menekan-kasus-covid-19-selama-2-pekan?page=all> Diakses pada 7 Desember 2022 pukul 19.57 WIB.

Asikin, Muhammad Nur, *Jadikan GJS Tempat Isolasi Pasien Covid-19* <https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/surabaya/29/07/2020/jadikan-gjs-tempat-isolasi-pasien-covid-19/%3famp> Diakses pada 8 Desember 2022, pukul 09.56 WIB.

Hidayat, Feriawan. *Industri E-Commerce Raup Untung di Masa Pandemi* <https://www.beritasatu.com/ekonomi/727253/industri-ecommerce-raup-untung-di-masa-pandemi> Diakses pada 22 November pukul 10.06 WIB

Kurniawan, Dian. *PSBB di Gresik Diberlakukan di 8 Kecamatan*, <https://surabaya.liputan6.com/read/4233805/psbb-di-gresik-diberlakukan-di-8-kecamatan-cek->

[detailnya#:~:text=Liputan6.com%2C%20Surabaya%20Pembatasan%20Sosial,%2C%20Duduksampeyan%2C%20Sidayu%20dan%20Gresik](https://surabaya.liputan6.com/read/4233805/psbb-di-gresik-diberlakukan-di-8-kecamatan-cek-detailnya#:~:text=Liputan6.com%2C%20Surabaya%20Pembatasan%20Sosial,%2C%20Duduksampeyan%2C%20Sidayu%20dan%20Gresik)

Kementerian Investasi, *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia> diakses pada 30 Agustus 2022, pukul 13.30 WIB.

Putri, Gloria Setyvani. *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global*, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global> Diakses pada 6 Desember 2020, pukul 12.27 WIB.

Sebayang, Rehia. *Termasuk China, Ini 11 Negara Yang Lockdown Gegara Covid-19*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200316115516-4-145119/termasuk-china-ini-11-negara-yang-lockdown-gegara-covid-19/2> Diakses pada 6 Desember pukul 13.03 WIB.

Situmorang, P. Anggun , *Sri Mulyani: Corona Beri 3 Dampak Besar Ekonomi Indonesia*, Diakses pada 29 Oktober 2021 <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4292763/srimulyani-corona-beri-3-dampak-besar-ke-ekonomiindonesia>

<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> diakses pada 6 September 2022, pukul 08.56 WIB.

<https://www.kemenkes.go.id/article/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html>

diakses pada 5 Desember 2022 pukul 18.33 WIB.

<https://covid19.go.id/p/berita/keterlibatan-desa-dalam-penanganan-covid-19#>

Diakses pada 10 Desember 2022 pukul 08.19 WIB

<https://tanggulrejo.com/data-desa/geografis> Diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 9.47 WIB.

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/07/14/124544869217136-program-bantuan-modal-usaha-mikro> Diakses pada 10 November 2022 pukul 12.40 WIB.